**BAB III**

**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Guna mendukung analisis pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan pemahaman terhadaprealisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya lima tahun sebelumnya. Proses analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu memahami jenis obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang disusun setiap tahun untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibahas bersama guna memperoleh persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sehingga mengikat berbagai pihak yang berkepentingan di daerah. Keterkaitan RPJMD dengan APBD merupakan satu rangkaian sistem perencanaan yang tidak dapat dipisahkan karena RPJMD memuat Visi, Misi, dan Rencana Strategis pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.Sedangkan APBD memuat rencana pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran, sehingga APBD merupakan arah kebijakan tahunan pemerintah daerah yang memuat seluruh rangkaian kegiatan SKPD. RPJMD merupakan panduan pemerintah dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahagar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam RPJMD. Pada sisilain APBD merupakan suatu komitmen politik antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengalokasikan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Tahapan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang tertuang di dalam RPJMD diharapkan dapat terealisasi selama lima tahun anggaran.

Arah kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar mengandung makna: 1) Arah kebijakan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah lima tahun; 2) Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk memperoleh sumber pendapatan dalam jumlah yang cukup.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda, maka kebijakan keuangan daerah juga dirinci perkomponen, meliputi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja setiap kegiatan harus diperhitungkan secara rill, sehingga dapat mendukung kebutuhan pembiayaan seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategik dan tidak memiliki nilai tambah dalam arti luas sedapat mungkin diminimalisir karena akan menjadi beban APBD.Untuk pemenuhan kebutuhan belanja, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui pendekatan *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* guna menutupi seluruh kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

APBD menganut struktur *surplus* dan *defisit* anggaran. Selisih antara pendapatan dengan belanja akan menentukan struktur anggaran mengalami *surplus* atau *defisit*. Jika APBD mengalami selisih lebih maka atas *surplus* tersebut akan dialokasikan pada pembiayaan yang diperkenankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika APBD mengalamiposisi *defisit* maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup *defisit* (pembiayaan penerimaan).

Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan antara lain “Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan,dan manfaat untuk masyarakat”.APBDmemuat semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang selanjutnya akan dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Prinsip pengelolaaan keuangan daerah akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan, dan belanja daerah.

**3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor utama yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tinggi rendahnya penerimaan daerah akan menentukan intensitas, konsistensi, dan kualitas pelayanan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan daerah dapat dijadikan barometer untuk menentukan tingkat kemandirian daerah. Rasio pendapatan asli daerahterhadap total APBD menunjukkan derajat *otonomi fiskal* memberikan gambaran kemandirian daerah otonom. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah masa lalu maupun kebijakan yang menjadi landasan pengelolaan keuangan daerah.

Ukuran Efektivitas Sesuai Surat Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1999

Tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Keuangan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Realisasi dari Target | Sebutan |
| 1 | <100 % | Sangat Efektif |
| 2 | 90 – 100 % | Efektif |
| 3 | 80 – 90 % | Cukup Efektif |
| 4 | 60 – 80 % | Kurang Efektif |
| 5 | 0 – 60 % | Tidak Efektif |

Sumber : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1999 tentang Penilaian KinerjaKeuangan

Penyusunan rencana pendapatan berawal dari penentuan potensi pendapatan dan target penerimaan setiap *item* pendapatan. Penentuan target idealnya mengacu pada analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penetapan target pendapatan diharapkan mampu memenuhi standar kemandirian daerah yang mengacu pada rasio 0 - < 50 %.

Upaya pencapaian standar *otonomi fiskal* merupakan cerminan keberhasilan sekaligus prestasi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016–2021, perlu diketahui dimana kita sekarang,dan akan kemana kita berlabuh lima tahun mendatang.

**3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

**3.1.1.1 Pendapatan Daerah**

**3.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya mengacu ke Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari aspek kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca keuangan daerah, serta tidak terlepas dari struktur pendapatan daerah dan belanja daerah. Neraca daerah mencerminkan perkembangan kondisi asset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten serta *ekuitas* dana yang tersedia.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang telah dipisahkan dan lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan 3) Lain–lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diluar kendali pemerintah kabupatenkarena alokasi dana tersebut dalam kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi. Penerimaan dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan pemerintah dengan menggunakan formula dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Satu-satunya sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah Pendapatan Asli Daerah.Pembiayaan dalam APBDmenganut sistem anggaran *surplus, devisit*,*dan berimbang*. *Surplus* anggaran akan membiayai program dan kegiatan baru. Anggaran *defisit* akan dibiayai melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penerimaan dari piutang daerah. Melalui sistem penganggaran tersebut diatas, posisi pendapatan dengan pembiayaan seimbang.Uraianpendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| **1** | PENDAPATAN | 416.640.403.000 | 522.611.674.000 | 506.189.199.667,48 | 616.067.840.000 | 680.778.697.000 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 18.117.097.000 | 19.329.908.000 | 17.704.242.622,12 | 23.627.884.000 | 35.742.492.000 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 1.716.100.000 | 1.797.000.000 | 2.101.870.175,00 | 1.939.500.000 | 3.472.000.000 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 2.829.757.000 | 2.105.000.000 | 2.437.079.611,16 | 2.715.500.000 | 8.410.725.000 |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 5.746.170.000 | 7.360.000.000 | 6.561.783.074,19 | 7.740.399.000 | 7.745.399.000 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang sah | 7.825.070.000 | 7.797.908.000 | 6.603.509.761,77 | 11.232.485.000 | 16.114.368.000 |
| **1.2** | **Dana Perimbangan** | 336.708.770.000 | 447.384.515.000 | 447.384.515.000 | 523.437.238.000 | 552.118.043.000 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak | 41.863.577.000 | 35.170.000.000 | 35.170.000.000 | 27.021.785.000 | 24.290.000.000 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 259.174.593.000 | 365.634.515.000 | 365.634.515.000 | 421.256.593.000 | 458.019.013.000,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 35.670.600.000 | 46.580.000.000 | 46.580.000.000 | 75.158.860.000 | 69.809.030.000,00 |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | 61.814.536.000 | 55.897.251.000 | 55.879.251.000 | 69.002.718.000 | 92.918.162.000 |
| 1.3.1 | Hibah | 1.150.000.000 | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya | 9.983.450.000 | 10.444.598.000 | 10.444.598.000 | 10.500.000.000 | 15.192.169.000 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 43.974.349.000 | 33.162.041.000,00 | 33.182.041.000,00 | 44.152.718.000 | 63.375.993.000.00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemeintah Daerah Lainnya | 6.706.737.000 | 12.270.612.000 | 12.270.612.000 | 14.350.000.000 | 14.350.000.000 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Target pendapatan daerah periode 2010-2014 menunjukkan kecenderungan meningkat, kecuali target penerimaan pada tahun 2012 menurun 3,14% dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2011. Sekalipun demikian rata-rata pertumbuhan target pendapatan daerah mencapai angka 10,9% pertahun. Menurunnya target penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2012 dipengaruhi menurunnya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sekitar 8,41% dari target penerimaan PAD Tahun Anggaran 2011.

Penetapan target PAD belum menunjukkan keinginan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengejar tingkat kemandirian fiskal sebagai ukuran kinerja keuangan. Berdasarkan target pendapatan daerah, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah tahun anggaran 2010-2014 berada dikisaran 3,49-5,25%. Angka tersebut menunjukkan *derajat otonomi fiskal* Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada posisi sangat kurang.

Indikator pengukuran kinerja keuangan daerah dengan pendekatan analisis *derajat otonomi fiskal* diukur dari realisasi pendapatan daerah, bukan berdasarkan target pendapatan daerah. Dalam konteks perencanaan keuangan target pendapatan merupakan harapan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Realisasi pendapatan daerah dari target yang ditetapkan menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan sumber-sumber PAD.

Upaya peningkatan *derajat otonomi fiskal* seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan pertarungan nilaikabupaten/kota dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan anggaran secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Semakin tinggi *derajat otonomi fiskal* kabupaten/kota, maka semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah. Jika Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkeinginan bergeser dari posisi sangat kurang ke posisi kurang, maka rasio realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah harus mencapai angka minimal 10,01% pertahun. Pencapaian angka tersebut memerlukan kerja keras dan komitmen yang baik para pihak yang terlibat dalam pemungutan dan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan rencana pembangunan sektor publik perlu mempertimbangkan aspek kemampuan *recovery cost* sebagian dan atau seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam penyediaan barang publik. Filosofi yang terkandung dalam konsep penyelenggaaran otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian daerah dan menekan angka ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah.Semakin tinggi rasio ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah berarti kemampuan keuangan daerah semakin rendah.

Tabel 3.2.

Realisasi Pendapatan DaerahKabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2010-2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Rata-rata tumbuh (%)** |
| **1** | PENDAPATAN | 390.795.357.009,76 | 506.685.524.763,48 | 506.189.199.667,48 | 608.119.377.623,33 | 670.312.955.795,01 | 8,99 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 10.818.840.397,97 | 18.200.567.718,12 | 17.704.242.622,12 | 22.477.926.250.29 | 35.695.955.795,01 | 30,26 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 1.623.652.550,00 | 2.101.870.175.00 | 2.101.870.175,00 | 2.457.847.693,00 | 4.184.916.682.00 | 23,33 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 1.404.327.898,00 | 2.186.270.620.16 | 2.437.079.611,16 | 2.653.680.672,75 | 7.376.165.857,86 | 52,31 |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 4.340.213.815,33 | 6.561.783.074,19 | 6.561.783.074,19 | 7.162.295.947,00 | 7.587.079.072,72 | 13,25 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yg sah | 3.441.646.134,64 | 7.350.643.848,77 | 6.603.509.761,77 | 10.204.101.937,54 | 16.547.794.002,43 | 44,03 |
| **1.2** | **Dana Perimbangan** | 372.542.690.782.38 | 437.373.683.627,00 | 436.943.371.127,00 | 519.597.570.386,00 | 547.019.012.578,00 | 8,30 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak | 26.093.964.352,00 | 25.159.168.627,00 | 24.728.856.127,00 | 23.182.117.386,00 | 19.190.969.578,00 | (5,75 ) |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 259.174.593.000,00 | 365.634.515.000,00 | 365.634.515.000,00 | 421.256.593.000,00 | 458.019.013.000,00 | 13 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 35.670.600.000,00 | 46.580.000.000,00 | 46.580.000.000,00 | 75.158.860.000,00 | 69.809.030.000,00 | 16,96 |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | 58.433.825.830,38 | 51.111.273.418,36 | 51.541.585.918,36 | 66.043.880.987,04 | 87.597.988.180,66 | 9,81 |
| 1.3.1 | Hibah | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | 1.150.000.000,00 | - | - | - | - | 0 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi &Pemerintah daerah Lain | 6.387.859.430,38 | 10.026.915.478,36 | 10.026.915.478,36 | 11.593.088.027,04 | 17.713.203.980,66 | 25,07 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 45.215.674.000,00 | 33.162.041.000,00 | 33.182.041.000,00 | 44.530.513.000,00 | 63.375.993.000.00 | 9,99 |
| 1.3.5 | Bantuan Keu dari Provinsi/Pemda Lainny | 5.680.292.400,00 | 7.902.316.940,00 | 8.332.629.440,00 | 9.920.279.960,00 | 6.508.791.200,00 | 5,84 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas memberikan gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah dari tahun 2010-2014mengalami pertumbuhan rata-rata 8,99% pertahun.Realisasi PAD mengalami pertumbuhan rata-rata 30,26% pertahun. Sekalipun rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Kepulauan Selayar relatif cukup tinggi, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata 3,71% pertahun.Sehingga tingkat ketergantungan pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar kepada pemerintah tingkat atas rata-rata sekitar 96,29%. Rendahnya penerimaan PAD dapat dipengaruhi oleh: 1) Penetapan target penerimaan tidak berdasarkan potensi pendapatan persektor penerimaan; 2) Hilangnya peluang pendapatan akibat keterlambatan dan atau ketidakkonsistenan pemungutan; 3) Terjadinya penguapan pendapatanakibat lemahnya pencatatandan pemungutan; dan 4)Potensi pendapatan yang tidak dijadikan obyek pungutan.

Tabel 3.3

Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten

Kepulauan Selayar Periode 2010-2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | PAD ( % ) | Perimbangan Keuangan ( % ) | Lain Lain Pendapatan Yang sah ( % ) |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 2010 | 2,44 | 84,34 | 13,22 |
| 2011 | 3,59 | 86,32 | 10,08 |
| 2012 | 3,49 | 86,32 | 10,18 |
| 2013 | 3,69 | 85,44 | 10,86 |
| 2014 | 5,32 | 81,61 | 13,06 |

Sumber data : Hasil olahan

Tabel 3.3 diatasmenunjukkan bahwa pada tahun 2010, ketergantungan pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap pemerintah tingkat atassekitar 97,46%. Kemudian pada tahun 2011 ketergantungan pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar sekitar 96,41%,pada tahun 2012 meningkat menjadi 96,51%,Pada tahun 2013menjadi 96,31%, dan pada tahun 2014 ketergantungan pendapatan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menurun menjadi 94,68%. Konstribusi PAD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap pendapatan daerah yang terbaik dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah tahun 2014 sekitar 5,32 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat tergantung pada ketersediaan pembiayaan dari pemerintah tingkat atas.

Tabel 3.4

Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2010-2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis PAD | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Pajak daerah | 1.716.100.000 | 1.797.000.000 | 1.797.000.000 | 1.939.500.000 | 3.472.000.000 |
| Retribusi daerah | 2.829.757.000 | 2.105.000.000 | 2.105.000.000 | 2.715.500.000 | 8.410.725.000 |
| Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 5.746.170.000 | 7.630.000.000 | 7.630.000.000 | 7.740.399.000 | 7.745.399.000 |
| Lain lain pendapatan daerah yang sah | 7.825.070.000 | 7.797.908.000 | 5.631.908.000 | 7.942.485.000 | 16.114.368.000 |
| Jumlah | 18,117,097,000 | 19,329,908,000 | 17,163,908,000 | 20,337,884,000 | 35,742,492,000 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Tabel 3.5

Realisasi PAD Kabupaten Kepulauan Selayar

2010-2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jenis PAD** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Pajak daerah | 1.623.652.550,00 | 2.101.870.175,00 | 2.101.870.175,00 | 2.457.847.693,00 | 4.184.916.682,00 |
| Retribusi daerah | 1.404.327.898,00 | 2.186.270.620,00 | 2.437.079.611,16 | 2.653.680.672,75 | 7.376.165.857,86 |
| Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 4.340,213.815,33 | 6.561.783.074,19 | 6.561.783.074,19 | 7.162.295.947,00 | 7.587.079.072,72 |
| Lain lain pendapatan daerah yang sah | 3.441.646.134,64 | 7.350.643.848,77 | 6.603.509.761,77 | 10.204.101.937,54 | 16.547.794.002,43 |
| Jumlah | 10,809,840,397,97 | 18,200,567,717,96 | 17,704,242,622,12 | 22,477,926,250.29 | 35,965,955,615,01 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Realisasi PAD pada tahun 2010 hanya mencapai 56,67% dari target Rp.18.117.097.000,-. kemudian padatahun 2011 mencapai 94,15 % dari target Rp.19.329.908.000,-.Pada tahun 2012 mengalami pelampauan target sekitar 3,15 % dari target penerimaan Rp.17.163.908.000,-. Pada tahun 2013 realisasi PAD kembali mengalami pelampauan target sekitar 10,52 % dari target Rp. 20.337.884.000,-, dan selanjutnya pada tahun 2014 juga mengalami pelampauan target sekitar 0,62% dari target Rp.35.742.492.000,-.

Tabel 3.6

Realisasi PAD terhadap Target PAD Kabupaten Kepulauan Selayar

periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Pajak Daerah  ( % ) | Retribusi daerah  ( % ) | Kekayaan Daerah yang dipisahkan ( % ) | Lain lain PAD Sah (%) |
| 2010 | 95 | 50 | 76 | 44 |
| 2011 | 117 | 104 | 80 | 95 |
| 2012 | 117 | 116 | 86 | 118 |
| 2013 | 127 | 98 | 93 | 129 |
| 2014 | 121 | 90 | 98 | 103 |

Sumber Data : Hasil olahan

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak daerah rata rata tumbuh 115,4 %, disusul penerimaan lain lain, PAD yang sah rata-rata tumbuh 97,8%, retribusi daerah rata rata tumbuh 91.6 %, penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan rata rata tumbuh 86,6%. Berdasarkan sebaran data persentase pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah yang pisahkan memiliki kecenderungan bergerak konstan dan konsisten. Ini berarti bahwa penetapan target pendapatan dari sektor tersebut relatif mendekati potensi. Lain halnya, dengan sebaran data penerimaan dari sektor pajak daerah yang cederung melampaui target penerimaan dan tidak konsisten, sehingga dapat diasumsikan bahwa penetapan target penerimaan belum mendekati potensi rill. Persentase penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah dan retribusi daerah cenderung berfluktuasi, tidak konstan dan tidak konsisten sehingga dapat diasumsikan bahwa penetapan target penerimaan dari kedua sektor tersebut belum mendekati potensi rill.

**Pajak Daerah**

“*Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (Peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor Pemerintah) berdasarkan Undang Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum”.*

Berdasarkan defenisi tersebut di atas maka pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,dalam konteks ini pihak pembayar tidak menerima kompensasi langsung atas pemenuhan kewajiban dimaksud .

Pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dari tahun ketahun mengalami penambahan jenis pungutan. Pada tahun 2010 jenis pajak daerah ada enam (6) yaitu: : 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak Penerangan Jalan; 6) Pajak Bahan Galian Golongan C. Pada tahun 2011 jenis pajak daerah bertambah dua jenis dibandingkan dengan jenis pungutan pajak tahun 2010 yaitu Pajak Air Bawah Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pada tahun 2012 dan 2013 jenis pungutan pajak sama dengan tahun 2011. Pada tahun 2014 sumber penerimaan dari pajak daerah bertambah satu satu jenis yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Fluktuasi penetapan target penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah merupakan akibat terjadinya penambahan sumber pungutan pajak baru. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7

Target Penerimaan Pajak Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Pajak | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Pajak Hotel | 100.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Pajak Restoran | 42.500.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
| 3 | Pajak Hiburan | 13.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 4 | Pajak Reklame | 40.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| 5 | Pajak Penerangan jalan | 670.000.000 | 972.000.000 | 972.000.000 | 1.144.500.000 | 1.260.000.000 |
| 6 | Pajak Tambang galian golongan C | 850.600.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 529.000.000 | 600.000.000 |
| 7 | Pajak Air bawah Tanah | - | - | - | 1.000.000 | 5.000.000 |
| 8 | Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan |  | 50.000.000 | 50.000.000 | 85.000.000 | 350.000.000 |
| 9 | Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan |  |  |  |  | 1.062.000.000 |
|  | Jumlah | 1,716,100,000 | 1.797.000.000 | 1.797.000.000 | 1.939.500.000 | 3.472.000.000 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Tabel 3.8

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Pajak | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Pajak Hotel | 55.888.990 | 68.746.700 | 68.746.700 | 137.182.000 | 97.275.050 |
| 2 | Pajak Restoran | 36.985.820 | 52.882.862 | 52.882.862 | 46.171.100 | 46.533.150 |
| 3 | Pajak Hiburan | 00 | 10.266.400 | 10.266.400 | 9.641.500 | 10.727.250 |
| 4 | Pajak Reklame | 39.167.562 | 80.323.700 | 80.323.700 | 89.349.800 | 95.468.000 |
| 5 | Pajak Penerangan jalan | 1.017.927.381 | 1.079.547.253 | 1.079.547.253 | 1.292.436.118 | 1.575.689.776 |
| 6 | Pajak Tambang galian golongan C | 482.682.797 | 736.446.160 | 736.446.160 | 798.806.660 | 905.222.880 |
| 7 | Pajak Air bawah Tanah | - | - | - | 280.800 | 2.166.864 |
| 8 | Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan |  | 73.657.100 | 73.657.100 | 83.979.715 | 408.090.674 |
| 9 | Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan | - | - | - | - | 1.043.743.218 |
|  | Jumlah | 1.632.652.550 | 2.101.870.175 | 2.101.870.175 | 2.457.566.893 | 4.184.916.862 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Berdasarkan tabel 3.7 dan 3.8 diatas menunjukkan penerimaan pajak daerah tahun 2010 terealisasi sekitar 25,8 % dari target Rp.6.327.730.000,-. Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi pelampauan target sekitar 16,97%dari target Rp.1.797.000.000,-. Pada tahun 2013 penerimaan dari sektor pajak daerah mengalami pelampauan target sekitar 26,71 % dari target sekitar Rp.1.939.500,000,- . Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami pelampauan target sekitar 20,53 % dari target Rp.3.472.000.000,-. Pelampauan target penerimaan pajak daerah dipengaruhi turunnya target penerimaan sekitar 45,13 - 72,07 % dari target penerimaan yang ditetapkan pada tahun 2010.

Penerimaan pajak daerah cenderung meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2011 penerimaan pajak daerah meningkat sekitar 28 % dibandingkan dengan penerimaan padatahun 2010. Pada tahun 2012 penerimaan pajak daerah mengalami stagnan dibandingkan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2011. Pada tahun 2013 penerimaan dari sektor pajak daerah meningkat sekitar 16,92% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2012. Pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sekitar 70,29 % dibandingkan penerimaan pajak daerah pada tahun 2013.

Peningkatan penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh terjadinya tambahan 3 tigajenis pajak baru, disamping meningkatnya kemampuan pemungut pajak dalam menjaring wajib pajak. Adapun jenis pajak daerah yang perlu terus ditingkatkan adalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Tambang Galian Golongan C dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pemungutan Pajak Hotel pada tahun 2010 terealisasi sekitar 55,88 % dari target Rp. 100.000.000,-.Pada tahun 2011 dan 2012 Pajak Hotel terealisasi sekitar 137,49 % dari target Rp. 50.000.000,- atau terjadi pelampauan target. Hal ini terjadi karena target penerimaan PajakHotel turun masing masing sekitar 50 % dibandingkan target penerimaan pada tahun 2010. Realisasi penerimaanPajak Hotel pada tahun 2013 sekitar 228,64 % dari target Rp.60.000.000,-, terjadinya pelampauan target karena target penerimaan Pajak Hotel turun sekitar 40 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2010. Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2014 sekitar 162,13 % dari target Rp. 60.000.000,-.Terjadinya peningkatan persentase penerimaan dipengaruhi oleh turunnya target penerimaan sekitar 40 % dibandingkan dengan target penerimaan pada tahun 2010. Penurunan target penerimaan Pajak Hotel hanya berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan tetapi tidak berpengaruh terhadap menurunan maupun peningkatan pendapatan rill. Rata rata pertumbuhan realisasi Pajak Hotel hanya mencapai 18,78 %.

Untuk pemungutan Pajak Restoran, pada tahun 2010 terialisasi sekitar 87,03 % dari target Rp. 42.500.000,- . Realisasi penerimaan Pajak Restoran pada Tahun 2011 dan 2012 mencapai angka 132,21 % dari target Rp. 40.000.000,-, artinya pemungutan sangat efektif. Realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2013 mencapai angka131,91 % dari target Rp. 35,000,000,-. Sedangkan realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2014 mencapai 131,92 % dari target Rp. 40,000,000,- sehingga disimpulkan bahwa pemungutan sangat efektif dengan rata rata pertumbuhan realisasi pajak restoran 6,21 % pertahun.

Pada tahun 2010, pemungutan Pajak Hiburan terealisasi 0 % dari target Rp.13.000.000,-, sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 terealisasi sekitar 41,07 % dari target Rp. 25.000.000,- artinya pemungutan tidak efektif. Selanjutnya, pada tahun 2013 terealisasi sekitar 92,42 % dari target Rp. 10.000.000,- artinya pemungutan mulai efektif,sedangkan pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Hiburan sekitar 53,64 % dari target Rp. 20.000.000,- artinya pemungutan kembali tidak efektif, dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan Pajak Hiburan mencapai angka 1,04 % pertahun.

Untuk pemungutan Pajak Reklame, pada tahun 2010 terealisasi sekitar 87,03 % dari target Rp. 40.000.000,-. Padatahun 2011 dan 2012 pemungutan pajak reklame terealisasi sekitar 133,87 % dari target Rp. 60.000.000,- artinya pemungutan sangat efektif. Realisasi penerimaanPajak Reklame pada tahun 2013 mencapai angka 119,13 % dari target Rp. 75,000,000,- dan realisasi penerimaan pada tahun 2014 mencapai angka 127,29% dari target Rp. 75.000.000,- artinya pemungutan sangat efektif. Dengandemikian maka rata-rata pertumbuhan terealisasi sekitar 24,63 % per tahun.

Untuk Pajak Penerangan Jalan, pada 2010 terealisasi sekitar 151,92 % dari target Rp. 670.000.000,-.Pada tahun 2011 dan 2012 terealisasi sekitar 111,06 % dari target Rp 972.000.000,-.Padatahun 2013 terealisasi sekitar 112,92 % dari target Rp. 1.144.500,000,-serta pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan mencapai angka sekitar 125,05 % dari target Rp.1.260.000.000,-, artinya pemungutan sangat efektif, hal tersebutdisebabkan peningkatan jumlah pelanggan PLN sejalan terbangunnya jaringan listrik ke kawasan pedesaan. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan realisasi Pajak Penerangan Jalan sekitar 9,64 % pertahun.

Pemungutan Pajak Tambang Galian Golongan C terealisasi 56,75 % dari target Rp.850.600.000,- artinya pemungutan tidak efektif. Realisasi penerimaanTambang Galian Golongan C tahun 2011 dan 2012 terealisasi sekitar 122,74 % dari target Rp.600.000.000,- artinya pemungutan sangat efektif. Selanjutnya, pada tahun 2013 mencapai angka 151 % dari target Rp.529,000,000,- artinya pemungutan sangat efektif. Sedangkan penerimaanPajak Tambang Galian Golongan C pada tahun 2014 mencapai angka sekitar 150,84 % dari target Rp.600.000.000,- artinya pemungutan sangat efektif. Berdasarkan angka angka tersebut dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Tambang Galian Golongan C pada tahun 2011 - 2014 cenderung melampaui target, karena target penerimaan mengalami penurunan sekitar 29 % dibandingkan dengan target penerimaan padat tahun 2010. Rata-rata pertumbuhan pendapatan dari Pajak Tambang Galian Golongan C mencapai angka 14,87 % per tahun. Peningkatan penerimaan rill dari Tambang Galian Golongan C dipengaruhi meningkatnya jumlah bangunan fisik yang dibiayai oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2013 terealiasir sekitar 28,08 % dari target Rp. 1.000.000,-, artinya pemungutan tidak efektif. Penerimaan pada tahun 2014 terealisasi sekitar 93,40 % dari target Rp. 5,000,000,- artinya pemungutan efektif,sekalipun persentase penerimaan cukup tinggi namun nilai rillnya sangat rendah.

Untuk pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)tahun 2011 dan 2012 terealisasi sekitar 147,71 % dari target Rp. 50.000.000,- artinya pemugutan sangat efektif. Realisasi penerimaan BPHTBpada tahun 2013 sekitar 98,79 % dari target Rp. 85.000.000,- artinya pemungutan berjalan efektif, dan pada tahun 2014 mencapai 116,60 % dari target Rp.350.000.000,- artinya pemungutan sangat efektif, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 99,99 % pertahun.

Pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2014 terealiasir sekitar 98,28 % dari targetRp. 1.062.000.000,- artinya pemungutan berjalan efektif. Jika dibandingkan penerimaan bagi hasil PBB sebelum diserahkan ke daerah sebagai PAD maka penerimaan dari bagi hasil PBB mencapai angka Rp.20.000.000.000 pertahun, artinya dengan perubahan regulasi Pemerintah Pusat,sangat merugikan Pemerintah Daerah yang berpendapatan rendah.

**Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah. Pembayaran retribusi hanya dikenakan kepada pihak yang memperoleh manfaat secara langsung atas fasilitas atau jasa yang disediakan oleh pemerintah dan pembebanannya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Retribusi pada prinsifnya merupakan pengembalian sebagian atau keseluruhan biaya atas penyediaan fasilitas yang disiapkan pemerintah dan secara langsung memberi manfaat kepada masyarakat yang menggunakannya. Artinya, retribusi merupakan pungutan yang paling adil karena wajib retribusi berhak memilih untuk menggunakan fasilitas dengan konsekuensi membayar kewajiban atau tidak memanfaatkan fasilitas dengan konsekuensi tidak memperoleh beban pembayaran.

Jenis retribusi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9 – 3.14 dibawah ini.

Tabel 3.9

Target Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 1.000.000.000 | 385.000.000 | 385.000.000 | 390.000.000 | 5.557.225.000 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan | 146.640.000 | 145.000.000 | 145.000.000 | 135.000.000 | 200.000.000 |
| 3 | Retribusi Penggantian KTP dan Akta Capil | 45.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 90.000.000 | - |
| 4 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 55.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pasar | 300.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 300.000.000 |
| 6 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 35.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 7 | Retribusi Pelayanan Pendidikan | - | - | - | 20.000.000 | 10.000.000 |
| 8 | Retribusi Tinja | - | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 |
| 9 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | - | 70.000.000 | 70.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| 10 | Retribusi Pengolahan Limbah Air | - | - | - | 15.000.000 | 10.000.000 |
| 11 | Retribusi Pelayanan Tera Ulang | - | - | - | 20.000.000 | 50.000.000 |
|  | Jumlah | 1.536.640.000 | 930.000.000 | 930.000.000 | 1.228.000.000 | 6.400.225.000 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Retribusi Jasa Umum meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mencakup Jasa Medik, Askes/ BPJS dan Jamkesmas/ BPJS. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Penetapan target penerimaan semua komponen yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum diasumsikan mengacu pada potensi rill.

Tabel 3.10

Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 480.941.283 | 400.091.532 | 400.091.532 | 512.151.716 | 5.142.118.330 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan | 129.128.000 | 132.390.500 | 132.390.500 | 159.163.000 | 166.381.500 |
| 3 | Retribusi Penggantian KTP dan Akta Capil | 78.080.000 | 110.380.000 | 110.380.000 | 163.225.000 | - |
| 4 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 23.770.000 | 3.619.500 | 3.619.500 | - | 3.600.000 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pasar | 115.614.500 | 113.156.500 | 113.156.500 | 123.444.900 | 108.938..750 |
| 6 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 10.187.500 | 10.088.000 | 10.088.000 | 18.893.000 | 17.431.000 |
| 7 | Retribusi Pelayanan Pendidikan | - | - | - | - | - |
| 8 | Retribusi Tinja | - | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.600.000 | 9.400.000 |
| 9 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | - | 8.484.264 | 8.484.264 | 166.494.693 | 397.327.590 |
| 10 | Retribusi Pengolahan Limbah Air | - | - | - | - | - |
| 11 | Retribusi Pelayanan Tera Ulang | - | - | - | - | - |
|  | Jumlah | 759.641.283 | 792.410.296 | 792.410.296 | 1.155.972.309 | 5.845.197.170 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Jika dibandingkan rasio target penerimaan Retribusi Jasa Umum perkomponen yang tertuang pada Tabel 3.9 dengan realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum perkomponen penerimaan yang tertuang pada tabel 3.10, diperoleh gambaran sebagai berikut.

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2010 terealisasi sekitar 48,09% dari target Rp.1.000.000.000,- artinya pemungutan tidak efetif. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 terealisasi sekitar 104% dari target Rp. 385.000.000,- berarti pemungutan retribusi pelayanan Kesehatan sangat efektif, kemudian pada tahun 2013 terelisasi sekitar 130% dari target Rp. 390.000.000,- artinya pemungutan sangat efektif. Kemudian pada tahun 2014 Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sekitar 92% dari target Rp.5.557.225.000,- artinya pemungutan retribusi efektif. Efektivitas pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sangat dipengaruhi menurunnya target penerimaan pada tahun 2011 – 2013 sekitar 61,5% - 69,5%, dari target penerimaan tahun 2010. Rasio pertumbuhan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan terjadi sebaran angka yang sangat ekstrim, pada tahun 2011 tumbuh16,81%, pada tahun 2012 tumbuh sekitar 0%, pada tahun 2013 tumbuh sekitar 28 %, dan pada tahun 2014 pertumbuhan mencapai sekitar 904 %. Rata-rata pertumbuhan Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai angka 183,04 % per tahun. Tingginya angka pertumbuhan disebabkan oleh penerimaan dari BPJS dan Jamkesmas, yang dimasukkan ke dalam komponen penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

PenerimaanRetribusi Sampah dan Kebersihan pada tahun 2010 mencapai angka 88 % artinya pungutan cukup efektif, tahun 2011 target penerimaan turun 1,12 % dari target penerimaan tahun 2010 sehingga realisasi mencapai angka 91 % artinya pemungutan efektif.Realisasi pendapatan pada tahun 2012 mencapai angka 93,30 % artinya pemungutan efektif karena target penerimaan turun 1,12 % dibandingkan dengan target pada tahun 2010.Tahun 2013 target penerimaan Retribusi Sampah Kebersihan turun 7,94 % dari target penerimaan tahun 2010, sehinggarealisasi penerimaan mencapai angka 117%, artinya pemungutan Retribusi Sampah dan Kebersihan sangat efektif, dan pada tahun 2014 target penerimaan meningkat 36,37% dari target penerimaan tahun 2010 danterealisasi sekitar 83,19% yang berarti pemungutan cukup efektif.

Jika dibandingkan pertumbuhan realisasi penerimaan Retribusi Persampahan dan Kebersihan pada tahun 2010, dengan tahun 2011 mengalami pertumbuhan sekitar 2,52%. Demikian halnya, realisasi penerimaan tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2011 mengalami pertumbuhan 0,00%, pada tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2012 tumbuh sekitar 20,23%, dan pada tahun 2014 dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2013tumbuh 4,53%. Rata rata pertumbuhan realisasi pemungutan Retribusi Sampah dan Kebersihan, sekitar 5,46% pertahun.

Realisasi penerimaan Retribusi Penggantian KTP dan Penerbitan Akta Catatan Sipil pada tahun 2010 terealisasi sekitar 173,1% dari target Rp. 45.000.000,-artinya realisasi penerimaan sangat efektif.Tahun 2011 terealisasi sekitar 169,82% dari target Rp. 60,000,000,-artinya pemungutan sangat efektif, dan pada tahun 2012 mencapai angka 169,82% dari target penerimaan sekitar Rp. 60,000,000,- sehingga penerimaan dikategorikan sangat efektif. Penerimaan tahun 2013 mencapai angka 181,36 % dari target sekitar Rp.90.000,000,-sehingga dapat dikatakan pemungutan retribusi penggantian KTP dan Akte Capil sangat efektif. Retribusi penerbitan KTP dan Akta Capil pada tahun 2014 tidak dipungut karena digratiskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pertumbuhanpenerimaan Retribusi Penggatian KTP dan Penerbitan Akta Capil pada tahun 2011 sekitar 41,37%, pada tahun 2012 mencapai angka 0,00% dan pada tahun 2013 mencapai angka 47,87%. Rata rata pertumbuhan dari tahun 2010-2013 mencapai angka 22,31%.Peningkatan penerimaan yang bersumber dari pelayanan KTP, Capil dan Akta Kelahiran disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketersediaan dokumen dimaksud.

Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum tahun 2010 mencapai angka sekitar 43,21%dari target Rp. 55.000.000,- berarti pemungutan kurang efektif.P ada tahun 2011 dan 2012 realisasi pemungutan masing-masing mencapai angka 14,48 %dari target Rp.25.000.000,- artinya pemungutan tidak berjalan efektif. Pada tahun 2013 realisasi pemungutan mencapai angka 0,00% dari target Rp. 10.000.000,-serta pada tahun 2014 realisasi penerimaan jasa mencapai angka sekitar 14,40% dari target penerimaan, sebesar Rp. 25.000.000,- dan dapat disimpulkan bahwa pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak efektif.

Selanjutnya, penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2010 mencapai angka sekitar 38,54 % dari target Rp. 300.000.000,-, artinya pungutan tidak efektif. Pada tahun 2011 dan 2012 realisasi pemungutan mencapai angka sekitar 56,57% dari target Rp.200.000.000,-artinya pemungutan tidak efektif. Pada tahun 2013 pemungutan Retribusi Pasar mencapai angka 49,38% dari target Rp. 250.000.000,-artinya pemungutan tidak efektif, dan pada tahun 2014 pemungutan mencapai angka 36,31 % dari target Rp. 300.000.000,- berarti pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar tidak efektif.

Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2011 sekitar 2,13 %, dan tahun 2012 sekitar 0,00 %, serta tahun 2013 tumbuh sekitar, 9,09 %, dan pada tahun 2014 tumbuh sekitar 11,75 %, sehingga rata-rata pertumbuhan mencapai angka 0,96% per tahun. Kondisi ini disebabkan kurang tegasnya pemerintah kabupaten dalam menetapkan lokasi berjualan dan belum tersedianya angkutan umum massal dalam kawasan perkotaan.

Penerimaan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 mencapai angka sekitar 29,11 % dari target Rp. 35.000.000,-artinya pungutan tidak efektif. Tahun 2011 dan 2012 pemungutan mencapai angka 50,44% dari target Rp. 20.000.000,-artinya pemungutan berjalan tidak efektif. Kemudian pada tahun 2013 pemungutan mencapai angka 104,96 %,dari target Rp.18.000.000,-, artinya pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun tersebut sangat efektif. Sedangkan, pada tahun 2014 realisasi mencapai, sekitar 96,83% dari target Rp. 18.000.000,-, artinya pemungutan efektif. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor mencapai angka 19,65% pertahun. Rendahnya pertumbuhan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh rendahnya jumlah armada angkutan umum perdesaan.

Penerimaan Retribusi Tinja pada tahun 2011 dan 2012 mencapai angka 71 % dari target Rp. 20.000.000,-, artinya pemungutan kurang efektif.Padatahun 2013 realisasi penerimaan mencapai 42%, dari target, sebesar Rp. 30.000.000,- artinya pemungutan RetribusiTinja tidak efektif. Tahun 2014 realisasi penerimaanmencapai 47 % dari target penerimaan, sebesar Rp. 20.000.000,-, artinya pemungutan tidak efektif.Tingkat pertumbuhan penerimaan Retribusi Tinja pada tahun 2012 tumbuh 0,00%, pada tahun 2013 sekitar 11,27%, dan pada tahun 2014 penerimaan 25,39%, sehingga rata-rata pertumbuhan penerimaan Retribusi Tinja adalah sekitar 9,19% pertahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih rendahnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Selanjutnya, untuk penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi pada tahun 2011 dan 2012 mencapai angka 12,12% dari target Rp. 70.000.000,-,artinya pemungutan tidak efektif.Pada tahun 2013 pemungutan terealisasi 66,60%, dari target Rp. 250.000.000,-, artinya pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2014 penerimaan mencapai 158,93% dari target Rp. 250.000.000,-, artinya, pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi pada tahun tersebut sangat efektif. Persentase realisasi penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi pada tahun 2012 mencapai angka 0,00 %, tahun 2013 penerimaan meningkat drastis sekitar 1.862,39 %, dan pada tahun 2014 pertumbuhan sekitar 138,64 %, sehingga rata-rata pertumbuhan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi sekitar 502,76% pertahun.

Penerimaan Retribusi Pengolahan Limbah Air,Retribusi Pelayanan Tera Ulang dan Retribusi Pendidikan, ketiganya merupakan jenis pungutan retribusi yang baru pada tahun 2013. Untuk Retribusi Pengolahan LimbahAir, sebesar Rp. 15.000.000,-, dan Retribusi Pelayanan Tera Ulang, sebesar Rp.20.000.000,-, Retribusi Pendidikan sebesar Rp.20.000.000,-. Demikian halnya,pada tahun 2014 Retribusi Pengolahan Limbah Air ditargetkan, sebesar Rp. 10.000.000,-, Retribusi Pelayanan Tera Ulang, sebesar Rp.50.000.000,-, dan Retribusi Pendidikan, sebesar Rp.10.000.000,-. Ketiga sumber pendapatan tersebut terealisasi, sekitar 0,00%.

Tabel 3.11

Target Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Retribusi Jasa Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 292.392.000 | 130.000.000 | 135.000.000 | 256.000.000 | 308.000.000 |
| 2 | Retribusi Tempat Pelelangan | - | 50.000.000 | 50.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 |
| 3 | Retribusi Terminal | 26.500.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 47.000.000 | 50.000.000 |
| 4 | Retribusi Tempat Parkir Khusus | - | 15.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 |
| 5 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa | 60.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 120.000.000 | 450.000.000 |
| 6 | Retribusi Rumah Potong Hewan | - | 5.000.000 | 5.000.000 |  | 50.000.000 |
| 7 | Retribusi Pelayanan Pelabuhan | 33.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 270.000.000 | 320.000.000 |
| 8 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | - | 44.000.000 | 44.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 9 | Retribusi Penyeberangan di Air | 178.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 10 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | - | 185.000.000 | 185.000.000 | 300.000.000 | 195.000.000 |
|  | Jumlah | 529.892.000 | 725.000.000 | 719.000.000 | 1.060.000.000 | 1.513.000.000 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Tabel 3.12

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 90.439.728 | 144.077.502 | 430.972.447 | 178.228.375 | 212.309.000 |
| 2 | Retribusi Tempat Pelelangan | - | 8.810.500 | 8.810.500 | 5.790.000 | 8.180.000 |
| 3 | Retribusi Terminal | 35.360.500 | 46.375.000 | 46.375.000 | 46.034.000 | 30.966.000 |
| 4 | Retribusi Tempat Parkir Khusus | - | 11.249.000 | 7.200.000 | 6.947.000 | 7.881.000 |
| 5 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa | 75.976.200= | 142.138.875 | 120.298.875- | 127.314.050 | 268.717.000 |
| 6 | Retribusi Rumah Potong Hewan | - | - | - | - | 6.090.000 |
| 7 | Retribusi Pelayanan Pelabuhan | 8.247.500 | 18.103.000 | 10.952.500 | 290.758.710 | 300.595.821 |
| 8 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | - | 3.208.000 | 2.858.000 | 7.454.000 | 9.430.000 |
| 9 | Retribusi Penyeberangan di Air | 108.460.868 | 264.008.950 | 264.008.950 | - | 11.171.500 |
| 10 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | - | 300.514.538 | 297.818.084 | 392.761.878 | 209.303.216 |
|  | Jumlah | 242.508.596 | 945.289.115 | 1.189.294.356 | 1.058.268.013 | 1.064.643.537 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Efektivitas pemungutan Retribusi Jasa Usaha akan diuraikan perkomponen penerimaan.Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2010 mencapai angka sekitar 30,93 % dari target sebesar Rp. 292.392.000,-, artinya pemungutan kurang efektif. Pada tahun 2011 mencapai angka 110,83% dari target Rp.130,000,000,- artinya pemungutan sangat efektif. Pada tahun 2012 realisasi pungutan mencapai angka 319,23% dari target Rp.135.000.000,- artinya pemungutan sangat efektif. Tingginya persentase penerimaan disebabkan turunnya target penerimaan sekitar 53,82% dari target penerimaan tahun 2010. Realisasi penerimaan pada tahun 2013 mencapai angka 69,62% dari target Rp.256.000.000,- artinya pemungutan retribusi kurang efektif sekalipun target mengalami penurunan sekitar 12,44% dari target penerimaan pada tahun 2010. Sedangkan realisasi penerimaan pada tahun 2014 mencapai angka 19,12% dari target Rp.308.000.000,- artinya pemungutan tidak efektif. Sekalipun target penerimaan cenderung menurun, tetapi realisasi penerimaan rill meningkat rata rata 43,78% pertahun.

Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan tahun 2011 dan 2012 mencapai angka 17,62 % dari target penerimaan sekitar Rp.50.000.000,-artinya pemungutan tidak efektif. Pada tahun 2013 realisasi pungutan mencapai angka 28,95% dari target Rp.20.000.000,-artinya pemungutan tidak efektif, sekalipun target penerimaan turun sekitar 60% dari target penerimaan pada tahun 2011. Pada tahun 2014 realisasi Retribusi Tempat Pelelangan mencapai angka 23,37, artinya pemungutan tidak efektif, sekalipun target penerimaan pada tahun 2014 turun sekitar 30% dari target penerimaan tahun 2011. Pertumbuhan Retribusi Tempat Pelelangan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mencapai angka 0,00%, tahun 2013 mencapai 34,28%, dan tahun 2014 mencapai angka 41,28%. Rata rata pertumbuhan Retribusi Tempat Pelelangan mencapai angka 1,75%.

Penerimaan Retribusi Terminal pada tahun 2010 mencapai angka sekitar 133,44%, dari terget sebesar Rp.26.000.000,- artinya pemungutan sangat efektif. Tahun 2011 dan 2012 realisasi penerimaan mencapai angka 103,06% dari target penerimaan, sebesar Rp.45.000.000,- artinya pemungutan sangat efektif. Pada tahun 2013 realisasi mencapai 97,94% dari target penerimaan, sebesar Rp.47.000.000,- artinya pemungutan efektif. Tahun 2014 realisasi pemungutan Retribusi Terminal hanya mencapai 61,93 % dari target, sebesar Rp.50.000.000,- artinya pemungutan kurang efektif.Pertumbuhan realisasi penerimaan Retribusi Terminal dari tahun 2010 ke tahun 2011 dan 2012 mencapai angka 31,15%, tahun 2013 mengalami pertumbuhan 0,73 %, serta pada tahun 2014 mengami pertumbuhan sekitar 32,73% . Sekalipun pemungutan Retribusi Terminal cenderung efektif, tetapi rata-rata pertumbuhan hanya pada kisaran 0,46%.

Penerimaan Retribusi Tempat Parkir Khusus, tahun 2011 mencapai 74,99 % dari target Rp.15.000.000,-, tahun 2012 realisasi mencapai 72% dari target penerimaan Rp.10.000.000,-,tahun 2013 realisasi mencapai angka 40,86% dari target penerimaan Rp.17.000.000,-, tahun 2014 realisasi mencapai angka 39,41% dari target penerimaan Rp. 20.000.000,-, dalam artian rata-rata tiap tahun pemungutan Retribusi Parkir Khusus tidak efektif. Pertumbuhan Retribusi Tempat Parkir Khusus dari tahun 2011 ke tahun 2012 mencapai angka 35,99%, tahun 2013 mencapai 3,51%, tahun 2014 mengalami pertumbuhan sekitar 11,85%. Pemungutan RetribusiTempat Parkir Khusus mengalami rata rata pertumbuhan sekitar 6,91%. Angka ini menunjukkan bahwa pemungutan Retribusi Tempat Parkir Khusus belum berjalan dengan baik.

Persentase Penerimaan Retribusi Penginapan pada tahun 2010 sekitar 126,62% dari target penerimaan, sebesar Rp.60.000.000,-, tahun 2011 sekitar 284% dari target penerimaan sebesar Rp.50.000.000,-, tahun 2012 sekitar 240,59% dari target penerimaan sebesar Rp.50.000.000,-, dan tahun 2013 sekitar 106.09% dari target penerimaan sebesar Rp.120.000.000,-, yang berarti pemungutan Retribusi Penginapan dari tahun 2010 sampai dengan 2013 sangat efektif. Pada tahun 2014 penerimaan Retribusi Penginapan hanya mencapai angka sekitar 59,71% dari target sebesar Rp.450.000.000,- artinya pemungutan tidak efektif. Pertumbuhan Retribusi Penginapan pada tahun 2011 sekitar 87,08%, tahun 2012 sekitar 15,37%, tahun 2013 sekitar 5,83 %,dan tahun 2014 tumbuh sekitar 111,07 %. Dengan demikian, maka rata-rata pertumbuhan Retribusi Penginapan tumbuh sekitar 37,72 % per tahun.

Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun 2011 dan tahun 2012 ditargetkan masing-masing Rp.5.000.000,- tetapi tidak terealisasi. Pada tahun 2014 terealisasi 12,18% dari target sebesar Rp.50.000.000,- yang berarti pemungutan tidak efektif. Kondisi ini dipengaruhi kecenderungan masyarakat melakukan pemotongan hewan diluar rumah potong hewan. Untuk meningkatkan penerimaan dari Retribusi Rumah Potong Hewan perlu dilakukan sosisalisasi utamanya yang berkaitan dengan manfaat rumah potong terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan pada tahun 2010 mencapai 24,99% dari target sebesar Rp.33.000.000,-, tahun 2011 sekitar 60,34% dari target sebesar Rp.30.000.000,-, tahun 2012 sekitar 36,51 % dari target penerimaan, sekitar Rp.30.000.000,- artinya pemungutan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berjalan kurang/tidak efektif. Penerimaan tahun 2013 realisasi pemungutan retribusi mencapai angka sekitar 107.69% dari target penerimaan sebesar Rp.270.000.000,-, tahun 2014 sekitar 93,94% dari target penerimaan sebesar Rp.320.000.000,- artinya pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 berjalan efektif/sangat efektif. Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada tahun 2011 tumbuh sekitar 119,47 %, tahun2012 sekitar 39,49%, tahun 2013 sekitar 2.554,7 %, dan pada tahun 2014 tumbuh sekitar 3,38 %. Rata-rata pertumbuhan mencapai angka sekitar 527,61 %.

Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;Pada tahun 2011 terealisasi sekitar 7,29% dari target sebesar Rp.40.000.000,-, tahun 2012 realisasi sekitar 6,49% dari target sebesar Rp.40.000.000,-, tahun 2013 sekitar 37,27% dari target penerimaan sebesar Rp.20.000.000,- artinya pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tidak efektif. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan sekitar 62,87% dari target sebesar Rp.15.000.000,- artinya Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tahun 2014kurang efektif. Pertumbuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada tahun 2012sekitar10,91%, tahun 2013 sekitar160,81%, tahun 2014 sekitar 26,51%. Rata-rata pertumbuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sekitar 44,1% pertahun. Walaupun angka pertumbuhannya tinggi namun nilai rillnya kecil yaitu, sebesar Rp.2.858.000 sampai Rp.9.430.000,-, artinya nilai rill tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penerimaan Retribusi Penyeberangan di Atas Air pada tahun 2010 terealisasi sekitar sekitar 60,93% dari target penerimaan sebesar Rp.178.000.000,- artinya pemungutan kurang efektif. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan mencapai angka sekitar 160,01% dari target penerimaan sebesar Rp.165.000.000,-, tahun 2012 realisasi pungutan sekitar 160,01% dari target penerimaan sebesar Rp.165,000,000,-, yang berarti pungutan sangat efektif pada tahun 2011 dan tahun 2012. Padatahun 2013 realisasi pungutan mencapai angka sekitar 0,00% dari target penerimaan sebesar Rp.10.000,000,- artinya tidak efektif. Tahun 2014 mencapai angka sekitar 111,72% dari target penerimaan sebesar Rp.10.000.000,- artinya pemungutan sangat efektif. Pertumbuhan Retribusi Penyeberangan di Atas Air pada tahun 2011 tumbuh sekitar 143,41%, tahun 2012 sekitar 0,00 %, tahun 2013 sekitar 0,00%, dan tahun 2014 tumbuh sekitar 0,00%. Rata-rata pertumbuhan mencapai angka sekitar 28,68 % per tahun. Jika dihubungkan antara angka realisasi dengan angka pertumbuhan tidak terjadi hubungan linier. Kondisi demikian perlu dikaji hingga diperoleh gambaran masalah yang sesungguhnya.

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah;Pada tahun 2011 realisasi pungutan mencapai angka sekitar 162,44% dari target penerimaan sebesar Rp.185.000.000,-tahun 2012 sekitar 160,78 % dari target penerimaan sebesar Rp.185.000.000,- tahun 2013 sekitar 130,92 % dari target penerimaan sebesar Rp.300.000.000,-, tahun 2014 sekitar 107,33 % dari target penerimaan Rp.195.000.000,-, yang berartipemungutan setiap tahun sangat efektif. Dari sisi pertumbuhan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah pada tahun 2012 mencapai angka sekitar0,89 %, tahun 2013 sekitar 31,87 %, dan tahun 2014 tumbuh sekitar 46,71 %. Nilai rata-rata pertumbuhan sekitar 3,93 %, yang menunjukkan bahwa target penerimaan yang ditetapkan tidak konsisten dengan potensi retribusi yang tersedia.

Tabel 3.13

Target Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Kepulauan Selayar

Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Retribusi Perizinan Tertentu** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Retribusi IMB | 600.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 350.000.000 |
| 2 | Retribusi Izin Gangguan/Keramaian SITU/ HO | 60.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 |
| 3 | Retribusi Izin Trayek | 17.500.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 7.500.000 |
| 4 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | 35.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000 | 65.000.000 |
| 5 | Retribusi Izin Usaha Konstruksi | 5.000.000 | - | - | - | - |
| 6 | Retribusi DAMIJA | 20.000.000 | - | - | - | - |
| 7 | Retribusi SIUP | 12.500.000 | - | - | - | - |
|  | Jumlah | 750.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 425.000.000 | 497.500.000 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Tabel 3.14

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Kepulauan Selayar

Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Retribusi Perizinan Tertentu** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Retribusi IMB | 274.329.969 | 338.868.409 | 339.693.409 | 296.652.750 | 302.600.000 |
| 2 | Retribusi Izin Gangguan/Keramaian SITU/ HO | 25.282.500 | 60.897.500 | 59.802.500 | 65.087.500 | 65.866.500 |
| 3 | Retribusi Izin Trayek | 5.340.000 | 5.265.300 | 5.535.300 | 5.296.100 | 8.616.600 |
| 4 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | 35.700.000 | 41.615.000 | 41.615.000 | 68.820.000 | 89.242.050 |
| 5 | Retribusi Izin Usaha Konstruksi | 8.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | - | - |
| 6 | Retribusi DAMIJA | - | - | - | - | - |
| 7 | Retribusi SIUP | 39.413.750 | 25.000 | 25.000 | - | - |
|  | **Jumlah** | 388.066.219 | 448.571.209 | 448.571.209 | 435.856.350 | 466.325.150 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2010 realisasi mencapai angka sekitar 45,72 % dari target sebesar Rp.600.000.000,- ini berarti pemungutan kurang efektif.Tahun 2011 mencapai angka sekitar 112,78% dari target sebesar Rp.300.000.000,-, tahun 2012 sekitar 113,23% dari target penerimaan sebesar Rp.300.000.000,- artinya pemungutan retribusi IMB tahun 2011 dan 2012 sangat efektif. Pada tahun 2013 realisasi pungutan sekitar 98,88% dari target sebesar Rp.300.000.000,- yang berarti pemungutan efektif. Pada tahun 2014 realisasi sekitar 86,45% dari target sebesar Rp.350.000.000,- ini berarti pemungutan cukup efektif. Pertumbuhan penerimaan Retribusi IMB tahun 2011 mencapai angka sekitar 23,52%, tahun 2012 sekitar 0,24%,tahun 2013 sekitar 12,67%, dan pada tahun 2014 sekitar 2,01%. Rata- rata pertumbuhan penerimaan Retribusi IMB sekitar 2,62 % pertahun.

Retribusi IzinGangguan, Keramaian/HO pada tahun 2010 realisasi pungutan mencapai angka sekitar 41,66% dari target sebesar Rp.60.000.000,-, tahun 2011 sekitar 76,12 % dari target sebesar Rp.80.000.000,-, tahun 2012 sekitar 74,75 % dari target sebesar Rp.80.000.000,- artinya pemungutan dari tahun 2010 sampai tahun 2012kurang efektif.Pada tahun 2013 realisasi mencapai sekitar 92,98 % dari target penerimaan, sekitar Rp.70.000.000,- berarti pemungutan efektif. Pada tahun 2014 terealisasi sekitar 87,82 % dari target sebesar Rp.75.000.000,-berarti pemungutan cukup efektif. Pertumbuhan penerimaan Retribusi IzinKeramaian, Gangguan/H0 pada tahun 2011 tumbuh sekitar 143%, tahun 2012 sekitar 1,79%, tahun 2013 sekitar8,84 %, dan tahun 2014 tumbuhsekitar 1,19%. Rata-rata pertumbuhan sekitar 30,25% per tahun.

Retribusi Izin Trayek pada tahun 2010 realisasi pungutan mencapai angka sekitar 30,51 % dari target sebesar Rp. 17.500.000,-, tahun 2011 sekitar 26,32 % dari target penerimaan sebesar Rp.20.000.000,-, tahun 2012 sekitar 27,67% dari target penerimaan sebesar Rp.20.000.000,-, tahun 2013 sekitar 56 % dari target sebesar Rp.10.000,000,- artinya pemungutan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tidak efektif. Pada tahun 2014 terealisasi sekitar115% dari target sebesar Rp.7.500.000,- ini berarti pemungutan retribusi tersebut sangat efektif. Rata-rata pertumbuhan retribusi izin trayek sekitar 12,42 % per tahun.

Retribusi IzinUsaha Perikanan pada tahun 2010 realisasi pungutan mencapai angka sekitar 102 % dari target sebesar Rp.35.000.000,- yang berarti pemungutan sangat efektif. Tahun 2011 dan tahun 2012 mencapai angka sekitar 83,23 % dari target sebesar Rp.50.000.000,- berarti pemungutan cukup efektif. Tahun 2013 terealisasi sekitar 153 % dari target sebesar Rp.45.000.000,-, tahun 2014 sekitar 138 % dari target penerimaan sebesar Rp.65.000.000,- yang berarti pemungutan sangat efektif. Pertumbuhan penerimaan Retribusi IzinUsaha Perikanan pada tahun 2011 sekitar 16,57%, tahun 2012 sekitar 0,00 %, tahun 2013 sekitar65,37 %, dan tahun 2014 sekitar 29,67 %. Rata-rata pertumbuhan penerimaan sekitar 20,85 % pertahun.

Retribusi IzinUsaha Konstruksi pada tahun 2010 realisasi pungutan sekitar 160% dari target sebesar Rp.5.000.000,- artinya pemungutan sangat efektif. Pada tahun 2011 dan 2012 terdapat masing masing, sekitar Rp.1.900.000,- sekalipun tidak ada target penerimaan. Rata-rata pertumbuhan mencapai sekitar 25,42 % pertahun.

Retribusi SIUP, pada tahun 2010 pungutan terealisasi sekitar 315,31 % dari target sebesar Rp.12.500.000,- artinya pemungutan sangat efektif. Tahun 2011 dan tahun 2012 terdapat penerimaan masing-masing, sebesar Rp.25.000,- sekalipun tidak ada target penerimaan. Rata rata pertumbuhan mencapai angka sekitar 33,31%.

Tabel 3.15

Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Retribusi Pemakaian Kekayaan** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Penerimaan Jasa Internet | 9.000.000 | - | 6.000.000 | 2.500.000 | - |
|  | **Jumlah** | 9.000.000 | - | 6.000.000 | 2.500.000 | - |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Tabel 3.16

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Retribusi Pemakaian Kekayaan** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Penerimaan Jasa Internet | 9.996.800 | - | 6.803.750 | 3.584.000 | - |
|  | **Jumlah** | 9.996.800 | - | 6.803.750 | 3.584.000 | - |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (penerimaan jasa internet) pada tahun 2010 terealisasi sekitar 111,08% dari target penerimaan sebesar Rp.9.000.000,- berarti penerimaan sangat efektif. Pada tahun 2011 realisasi 0,00% dari target Rp. 00,- artinya tidak ada pungutan. Pada tahun 2012 terealisasi sekitar 113,39% dari target Rp.6.000.000,-,tahun 2013 realisasi sekitar 143,36% dari target sebesar Rp.2.500.000,- artinya pemungutan tahun 2012 dan 2013 sangat efektif. Rata rata pertumbuhan pendapatan dari jasa internet sekitar 11,83%. Pemungutan retribusi jasa internet cenderung menurun karena munculnya tehnologi *android* yang memberi kemudahan bagi pengguna telepon seluler untuk melakukan akses internet.

**Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.**

PAD yang bersumber dari kekayaan daerah yang pisahkan merupakan sumber pendapatan yang berasal dari laba atas modal yang diinvestasikan pada suatu lembaga frofit. Penerimaan daerah bisa berasal dari pembagian deviden maupun laba perusahaan daerah. Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ada dua sumber penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan dari perusahaan daerah dan pendapatan dari penyertaan modal pada PT. Bank Sulawesi Selatan Barat(Sulselbar). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.17

Target Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PERUSDA/BUMD

Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PERUSDA/BU** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Perusahaan Daerah | 146.170.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 240.000.000 | 245.000.000 |
| 2 | Penyertaan Modal pada Bank Sul-Sel | 5.600.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.399.000 | 7.500.399.000 |
|  | **Jumlah** | **5.746.170.000** | **7.630.000.000** | **7.630.000.000** | **7.740.399.000** | **7.745.399.000** |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Tabel 3.18

Realisasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PERUSDA/BUMD

Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Perusahaan Daerah | 106.169.600 | 97.822.019 | 97.882.019 | 178.772.203 | 175.444.405 |
| 2 | Penyertaan Modal pada Bank Sul-Sel | 4.234.044.215 | 6.463.961.055 | 6.463.961.055 | 6.983.523.744 | 7.411.634.667 |
|  | **Jumlah** | **4.340.213.815** | **6.561.783.074** | **6.561.783.074** | **7.162.295.947** | **7.587.079.072** |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Penerimaan daerah yang berasal dari laba perusahaan daerah cenderung berfluktuasi baik target penerimaan maupun realisasi penerimaan selama kurun waktu lima tahun. Besar kecilnya pendapatan sangat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan dari bagi hasil laba Perusahaan Daerah (Perusda) mencapai angka sekitar 72,63 % dari target penerimaan sebesar Rp.146.170.000,- artinya penerimaan kurang efektif. Pada tahun 2011 dan 2012 mencapai angka sekitar 75,29 % dari target sebesar Rp.130.000.000,-, tahun 2013 sekitar 74,49 % dari target penerimaan sebesar Rp.240.000.000,-, tahun 2014 sekitar 71,61 % dari taget penerimaan sebesar Rp. 245.000.000,-, berarti penerimaan kurang efektif. Rata rata pertumbuhan 14,58 % per tahun, yang berarti Perusda menjaga kepercayaan pemegang saham.

Penerimaan daerah yang berasal dari pembagian deviden atas penyertaan modal pada PT. Bank Sulselbar pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh pendapatan sekitar 75,61 % dari target penerimaan sebesar Rp.5.600.000.000,- artinya penerimaan kurang efektif. Tahun 2011 dan 2012 diperoleh pendapatan sekitar 86,18 % dari target penerimaan sebesar Rp.7.500.000.000,- artinya penerimaan cukup efektif. Tahun 2013 realisasi sekitar 93,11 % dari target penerimaan sebesar Rp.7.500.399.000,-, tahun 2014 realisasi penerimaan sekitar 98,81 % dari target sebesar Rp.7.500.399.000,-, berarti penerimaan tahun 2013 dan tahun 2014 efektif. Rata rata pertumbuhan penerimaan deviden dari PT Bank Sulselsar mencapai kisaran angka 13,37 % per tahun, yang berarti PT. Bank Sulselbar sangat menjaga kepercayaan pemegang saham.

Berdasarkan sebaran angka realisasi penerimaan dibandingkan dengan target penerimaan ada kecenderungan penetapan target penerimaan atas bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan mendekati potensi rill. Kondisi ini ditandai dengan tidak terjadinya lonjakan dan atau penurunan persentase penerimaan serta pertumbuhan pendapatan yang tajam.

**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis penerimaan yang tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat 17 (tujuh belas) jenis penerimaan sebagaimana diuraikan pada tabel 3.19 di bawah ini:

Tabel 3.19

Target Lain-Lain PAD yang Sah

Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat | 35.341.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| 2 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua | 653.000 | - | - | - | - |
| 3 | Penjualan Rumah Dinas | 346.941.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 19.430.000 |
| 4 | Jasa Giro Kasda | 1.095.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
| 5 | Rekening Deposito Pada Bank Sul-Sel | 1.900.000.000 | 1.360.000.000 | 1.360.000.000 | 2.500.000.000 | 7.187.100.000 |
| 6 | Kerugian Uang | - | - | - |  | 2.300.000.000 |
| 7 | Pengembalian Bantuan Uang Muka Perumahan | 33.360.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 33.360.000 |
| 8 | Angsuran Dana Pemberdayaan Masyarakat | 500.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 60.000.000 | 50.000.000 |
| 9 | Angsuran / Cicilan Penjualan Roda Dua untuk PNS | 156.000.000 | 156.000.000 | 156.000.000 | 20.000.000 | 9.620.000 |
| 10 | Sumbangan Pihak Ketiga | 245.775.000 | - | - | - | - |
| 10 | Penerimaan dari Lain-lain PAD | - | 4.300.000.000 | 4.300.000.000 | 3.955.311.000 | 2.200.000.000 |
| 11 | Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | - | 1.281.908.000 | 1.281.908.000 | 3.952.174.000 | 3.489.858.000 |
| 12 | Penggantian KTP dan Akta Capil | - | - | - | - | 125.000.000 |
| 13 | Pengembalian Hasil Temuan | - |  |  |  |  |
| 14 | Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji | - | - | - | - | - |
| 15 | Pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) | 27.000.000 | - | - | - | - |
| 16 | Penerimaan Jasa Bandara | 2.500.000 | - | - | - | - |
| 17 | Penerimaan Asbuton | 600.000.000 | - | - | - | - |
| 18 | Penerimaan Bus Angkutan Sekolah | 17.500.000 | - | - | - | - |
|  | **Jumlah** | **5.072.070.000** | **7.797.908.000** | **7.797.908.000** | **11.232.485.000** | **16.114.368.000** |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Penerimaan dari Penjualan Kendaraan DinasRoda Empat, pada tahun 2010 terealisasi sekitar 91,95 % dari target sebesar Rp.35.341.000,- berartipenerimaan atas pejualan mobil dinas efektif. Tahun 2011 terealisasi sekitar 69,42% dari target sebesar Rp.45.000.000,- berarti penerimaan kurang efektif. Tahun 2012 terealisasi sekitar 177,21% dari target sebesar Rp.45.000.000,- berarti penerimaan sangat efektif. Tahun 2013 terealisasi sekitar 66,54% dari target sebesar Rp.40.000.000,- berarti penerimaan kurang efektif. Tahun 2014 realisasi penerimaan sekitar 145% dari target sebesar Rp.50.000.000,- ini berarti penerimaaan sangat efektif.

Untuk Penerimaan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua, pada tahun 2010 tidak ada penerimaan sementara target penerimaan ditetapkan, sebesar Rp.653.000,- Pada tahun 2011 dan 2012 sekalipun tidak ada target penerimaan tetapi terdapat penerimaan masing-masing, sebesar Rp. 2.028.733,- dan Rp. 1.381.040,-

Penerimaan Hasil Penjualan Rumah Dinas; Pada tahun 2010 terealisasi sekitar 8,91 % dari target sebesar Rp.346.941.000,- bermakna pemungutan tidak efektif. Tahun 2011 realisasi sekitar 73,46% dari target sebesar Rp.50.000.000,-, tahun 2012 realisasi sekitar 67,08 % dari target sebesar Rp.50.000.000,- berarti pemungutan tahun 2011 dan 2012 kurang efektif. Tahun 2013 realisasi sekitar 57,06% dari target sebesar Rp.35.000.000,- berarti pemungutan tidak efektif. Tahun 2014 realisasi sekitar 92,85% dari target sebesar Rp.19.430.000,- artinya pemungutan efektif.

Penerimaan Jasa Giro pada PT. Bank SulSelBar tahun 2010 terealisasi sekitar 39,51% dari target sebesar Rp.1.095.000.000,- berarti pemungutan tidak efektif. Tahun 2011 terealisasi sekitar 113,30% dari target penerimaan, sekitarRp.500.000.000,- tahun 2012 sekitar 113,30% dari target sebesar Rp.500.000.000,-,tahun 2013 terealisasi sekitar 106,51 % dari target penerimaan sebesar Rp.650.000.000,-, tahun 2014 terealisasi sekitar 121,61 % dari target penerimaan sebesar Rp.650.000.000,- berarti penerimaan Jasa Giro dari PT. Bank SulSelBar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sangat efektif.

Penerimaan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar tahun 2010 terealisasi sekitar 30,77% dari target penerimaan sebesar Rp.1.900.000.000,- bermakna penerimaan tidak efektif. Tahun 2011 realisasi sekitar 105,98% dari target penerimaan sebesar Rp.1.360.000.000,-, tahun 2012 realisasi sekitar 105.98% dari target penerimaan, sekitarRp. 1.360.000.000,-, tahun 2013 realisasi sekitar 147,42% dari target penerimaan sebesar Rp.2.500.000.000,-, tahun 2014 realisasi sekitar 112,61% dari target penerimaan sebesar Rp.7.187.100.000,- artinya penerimaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014sangat efektif.

Untuk penerimaan Pengembalian Bantuan Uang Muka Perumahan pada tahun 2010 terealisasi sekitar 49,01% dari target penerimaan sebesar Rp.33,360,000,-tahun 2011 terealisasi sekitar 32,06% dari target penerimaan sebesar Rp.30.000.000,- tahun 2012 terealisasi sekitar 32,06% dari target penerimaan sebesar Rp.30.000.000,- tahun 2013 realisasi sekitar 26,41% dari target penerimaan sebesar Rp.20.000.000,- tahun 2014 realisasi sekitar 131,97% dari target penerimaan sebesar Rp.33.360.000,- berarti penerimaan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sangat efektif.

Pengembalian Bantuan Cicilan Penjualan Kendaraan Roda Dua bagi PNS, pada tahun 2010 penerimaan terealisasi sekitar 95,83% dari target penerimaan sebesar Rp.165.000.000,- artinya penerimaan efektif. Tahun 2011dan tahun 2012 masing masing terealisasisekitar 60,5% dari target penerimaan sebesar Rp.165.000.000,- berarti penerimaan kurang efektif. Tahun 2013 terealisasi sekitar 96,20% dari target penerimaan sebesar Rp.20.000.000,-artinya pemungutan efektif. Tahun 2014 terealisasir sekitar 0,00 % dari target penerimaan sebesar Rp.9.620.000,- artinya pemungutan tidak efektif.

Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat, pada tahun 2010 penerimaan terealisasi sekitar 7,12 % dari target sebesar Rp.500.000.000,- artinya penerimaan tidak efektif. Tahun 2011 terealisasi sekitar 102,08 % dari target sebesar Rp.75.000.000,- artinya penerimaan sangat efektif. Tahun 2012 terealisasi sekitar 102,36 % dari target penerimaan sebesar Rp.75.000.000,-, tahun 2013 terealisasi sekitar 102,36% dari target penerimaan sebesar Rp.60.000.000,- artinya penerimaan tahun 2012 dan 2013 sangat efektif. Tahun 2014 terealisasi sekitar 99,66% dari target penerimaan sebesar Rp.50.000.000,- artinya penerimaan efektif.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada tahun 2011 terealisasi sekitar 47,99% dari target penerimaan sebesar Rp.1.281.908.000,- artinya penerimaan tidak efektif. Tahun 2012 mencapai sekitar 161,46% dari target penerimaan sebesar Rp.1.281.908.000,-, tahun 2013sekitar 122,73% dari target penerimaansebesar Rp.3.952.174.000,- ,tahun 2014 terealisasi sekitar 102,88% dari target penerimaan sebesar Rp.3.489.958.000,-, berarti penerimaandari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sangat efektif. Penerimaan JKN rata-rata tumbuh sekitar 83,90% pertahun.

Penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada tahun 2010 tidak ditargetkan tetapi ada penerimaan sekitar Rp.922.486.870,-, tahun 2011 terealisasi sekitar 103,88% dari target penerimaan sebesar Rp.4.300.000.000,- artinya penerimaan sangat efektif. Tahun 2012 terealisasi sekitar 51,80% dari target penerimaan sebesar Rp.4.300.000.000,-, tahun 2013 sekitar 36,17% dari target penerimaan sebesar Rp.3.955.311.000,-, tahun 2014 sekitar 18,68% dari target penerimaan sebesar Rp.2.200.000.000,-artinya penerimaan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tidak efektif. Rata rata pertumbuhan mencapai angka 45,41% pertahun.

Penerimaan Asbuton, Pada tahun 2010 terealisasi sekitar 21.81%dari target penerimaan sebesar Rp.600.000.000,- artinya pemungutan tidak efektif.Penerimaan Angkutan Bus Sekolah pada tahun 2010 terealisasi sekitar 35,2 % dari target penerimaan sebesar Rp.17.500.000,- artinya pemungutan kurang efektif. Penerimaan Jasa Bandara pada tahun 2010 terealisasi sekitar 66,72% dari target sebesar Rp.2.500.000,- tahun 2011 sekalipun tidak ditargetkan tetapi ada penerimaan sebesar Rp.1.517.500,-. Pengembalian Pembayaran Gaji tahun 2010 sebesar Rp.52.507.032,-. Penerimaan Penggantian Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Pencatatan Sipil (Capil) tahun 2014 terealisasi sekitar 60% dari target, sebesar Rp.125.000.000,- artinya penerimaan kurang efektif. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara; Pada tahun 2014 terealisasisekitar 148% dari target penerimaan sebesar Rp.2.300.000.000,-artinya pemungutan sangat efektif. Penerimaan Tanda Daftar Perusahaan, pada tahun 2010 terealisasi sekitar 36,67% dari target penerimaan sebesar Rp.27.000.000,- artinya pemungutan tidak efektif.Pada tahun 2011 terdapat penerimaan sebesar Rp.300.000,-sekalipun tidak ada target penerimaan. Pada tahun 2010 terdapat pengembalian hasil temuan sebesar Rp. 901.852.823,- sekalipun tidak ada target penerimaan. Pada tahun 2010 terdapat pengembalian kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp.52.507.032,-. Pada Tahun 2010 sumbangan pihak ketiga ditargetkan sebesar Rp.245.775.000,- dan terelisasi 0,00 %, artinya pemungutan tidak efektif.

**3.1.1.2. Dana Perimbangan.**

Dana Perimbangan Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum DAU). Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 dapat dijelaskan, sebagai berikut. Realisasi dana perimbangan pada tahun 2010 sebesar Rp. 372. 542.690.782,38,- atau sekitar 10% dari target penerimaan, sebesar Rp. 336.708.770.000,-;Tahun 2011 terealisasi sebesar Rp.437.373.683.627,- atau sekitar 97,76 % dari target penerimaan, Rp.447.384.515.000,-; Tahun 2012 terealisasi sebesar Rp.436.943.371.127,- atau sekitar 97,66% dari target penerimaan, Rp.447,384,515,000,-; Tahun 2013 terealisasi sebesar Rp.519.597.570.386,- atau sekitar 99,27 % dari target sebesar Rp. 523,437,238,000,- Tahun 2014 terealisasi, sekitar Rp547.019.012.578,- atau sekitar 99,08 % dari target sebesar Rp.552,118,043,000,-. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan sekitar 8,3 % pertahun. Kontribusi dana perimbangan terhadap total Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2010 sekitar 86,19 %, tahun 2011 sekitar 85,61 %, tahun 2012 sekitar 88,38 %, tahun 2013 sekitar84,96 %,dan pada tahun 2014 sekitar 81,1 %.

* + - 1. **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari; dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp.58.433.825.830,38,- atau sekitar 94,53 % dari target penerimaan sebesar Rp.61,814,536,,000,-, Tahun 2011 terealisasi sebesar Rp. 51.111.273.418,38,- atau sekitar 91,44 % dari target penerimaan sebesar Rp. 55,897,251,000,-, Tahun 2012 teralisasi sebesar Rp. 51.541.585.918,36,- atau sekitar 92,24 % dari target penerimaan sebesar Rp.55,879,251,000,-, Tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 66.043.880.987,04,- atau sekitar 95,71 dari target penerimaan sebear Rp. 69,002,718,000,-, Tahun 2014 terealisasi sebesar Rp.87.597.988.180,66,- atau sekitar 94,27 % dari target penerimaan sebesar Rp.92,918,162,000,-. Rata-rata pertumbuhan penerimaan yang bersumber dari lain- lain pendapatan daerah yang sah sekitar 9,81 % pertahun.

* 1. **Belanja Daerah**

Analisis belanja daerah merupakan suatu instrumen untuk mengetahui kecenderungan belanja daerah pada periode 2012 – 2014 sebagai dasar untuk menentukan arah pencapaian tujuan yang diharapkan selama lima tahun mendatang sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Perkembangan belanja daerah di kabupaten Kepulauan Selayar dianalisis berdasarkan jenis belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal.

**3.2.1.Neraca Keuangan Daerah**

Neraca sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.22 menunjukkan bahwa neraca keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2010 dan 2011 terkesan tidak sehat karena beban jangka pendek lebih besar dibandingkan ketersediaan kas lancar artinya terjadi defisit. Pada tahun 2010 rasio lancar hanya mencapai angka sekitar 0,96 % artinya ada kemungkinan sekitar 4 % kewajiban jangka pendek mengalami *effantit.* Quick Rasio mencapai angka sekitar 0,84 artinya Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pinjaman karena jika meminjam satu rupiah, maka tidak ada nilai yang mampu menjamin pinjaman akan terbayar.Selanjutnya *solvabilitas* mencapai angka sekitar 0,014 artinya asset tetap mampu melunasi semua pinjaman jika kondisi tersebut harus dihadapi, karena nilai asset tetap jauh lebih besar dibandingkan total pinjaman. Guna mengatasi masalah pemenuhan kewajiban jangka pendek pada tahun 2010, Pemerintah Daerah mencari sumber pembiayaan atau menunda pembayaran dalam bentuk kegiatan lanjutan tetapi tidak dilakukan. Namun pada akhir periode akuntansi terdapat Silpa, sekitar Rp.6.929.698.380,08,-

Kondisi neraca pada tahun 2011 justru lebih buruk dibandingkan kondisi neraca pada tahun 2010. Rasio kas lancar mencapai angka sekitar 0,70 artinya sekitar 30 % kewajiban jangka pendek mengalami *effantit*. *Quick rasio* mencapai angka sekitar 0,5, artinya pemerintah tidak dapat melakukan pinjaman karena sekalipun Pemerintah Daerah bermaksud meminjam satu rupiah, maka tidak ada penjamin yang akan menalangi pinjaman. *Solvabilitas* mencapai angka 0,019 artinya pemerintah mampu membayar pinjaman melalui aset tetap dengan melepaskan sebagian asset tetapi tidak dilakukan. Namun pada akhir periode akuntansi ditemukan Silpa, sebesar Rp. 10.326.772.514,72. Kondisi ini menunjukkan bahwadefisit yang terjadi bukan defisit rill atau *effantit.* Posisi neraca pada tahun 2012,2013, dan 2014 tidak sama yang terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2012 posisi neraca tampak lebih sehat dibandingkan tahun sebelumnya, sekalipun porsi belanja tidak langsung masih lebih besar dari pada belanja langsung. Belanja langsung mencapai angka sebesar Rp. 232.241.964.407,- sedangkan belanja tidak langsung mencapai angka sebesar Rp. 209.685.818.410,-. Pada tahun 2013 komponen belanja tidak langsung sebesar Rp.247.046.545.663,- sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 302.795.963.368,-. Hal ini berarti komponen belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Pada tahun 2014 belanja langsung sebesar Rp.351,403,398,286,-. sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp.248,921,947,367, ini berarti bahwa belanja langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung.

Tabel 3.20

Neraca Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2010 (audited) (Rp)** | **2011 (audited) (Rp)** | **2012 (audited) (Rp)** | **2013 (audited) (Rp)** | **2014 (audited) (Rp)** | **Rata-rata Pertumbuhan (%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **ASET** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **ASET Lancar** | 20,347,335,417,94 | 30,306,998,220,35 | 52,963,921,207,57 | 66,445,633,488,16 | 90,776,524,214,24 | 22.34 |
| 1.1.1 | Kas | 6,945,750,458,08 | 10,550,980,854,72 | 34,998,115,989,20 | 47,226,122,662,53 | 63,440,546,514,20 | 63.77 |
| 1.1.2 | Piutang | 10,522,573,894,,86 | 11,153,418,769.13 | 13,222,671,796,51 | 14,222,370,371,48 | 13,578,119,499,90 | 5.51 |
| 1.1.3 | Persediaan | 2,897,011,065 | 8,602,598,596,50 | 6,591,156,111,25 | 7,648,891,668,90 | 17,540,938,339,67 | 92.91 |
| 1.2. | **INVESTASI JANGKA PANJANG** |  |  |  |  |  |  |
|  | INVESTASI Non Permanen | 3,940,500,000,00 | 3,515,500,000,00 | 1,247,811,059,00 | 1,225,843,346,50 | 1,171,785,584,00 |  |
| 1.2.1 | Pinjaman Pada Perusahaan Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2.2 | Pinjaman Pada Perusahaan Daerah |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Pinjaman pada Pemerintah Daerah Lainnya |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Ivestasi dalam surat Utang Negara |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Investasi Dana Bergulir | 3,940,500,000,00 | 3.515.500,000,00 | 1,247,811,059,00 | 1,225,843,346,50 | 1,171,785,584,00 | -16.29 |
| 1.2.6 | INVESTASI Non Permanen Lainnya |  |  |  |  |  |  |
|  | **Investasi Permanen** | 49,926,547,845,00 | 39,546,586,845,00 | 49,926,447,458,00 | 54,059,348,845,00 | 54,059,348,845,00 |  |
| 1.2.1 | Penyertaan Modal pada Bank BPD | 20,330,000,000,00 | 21,830,000,000,00 | 21,830,000.000.00 | 24,330,000,000,00 | 24,330,000,000,00 | 0.89 |
| 1.2.2 | Penyertaan Modal pada PDAM | 10,316,586,845,00 | 19,196,547,845,00 | 19,196,447,845,00 | 20,829,348,845,00 | 20,829,348,845,00 | 19.5 |
| 1.2.3 | Penyertaan modal PD Berdikari | 2,250,000,000,00 | 2,250.000,000,00 | 2,250,000,000,00 | 2,250,000,000,00 | 2,250,000,000,00 | 0 |
| 1.2.4 | Penyertaan Modal Pada BPR - PEMP | 4,150,000,000,00 | 4,150,000,000,00 | 4,150,000,000,00 | 4,150,000,000,00 | 4,150,000,000,00 | 0 |
| 1.2.5 | Penyertaan Modal pada PT. Selayar Utama | 2,500,000,000,00 | 2,500,000,000,00 | 2,500,000,000,00 | 2,500,000,000,00 | 2,500,000,000,00 | 0 |
| 1.2.6 | Investasi Permanen Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **DISINVETASI JANGKA PANJANG** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **ASET TETAP** | 1,378,268,815,791,10 | 1,478,927,868,783,70 | 1,575,528,720,975,23 | 1,725,806,766,860,68 | 1,885,567,555,097,68 |  |
| 1.3.1 | Tanah | 178,537,957,213,00 | 180,701,382,213,00 | 173,907,959,181,00 | 176,885,463,841,00 | 181,310,527,341,00 | 0.29 |
| 1.3.2 | Peralatan dan mesin | 107,289,823,043,38 | 129,356,121,213,00 | 145,460,650,035,23 | 161,123,130,490,18 | 166,900,029,007,18 | 9.47 |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | 262,769,419,242,66 | 279,987,287,137,66 | 279,637,311,055,50 | 302,504,628,719,50 | 333,804,586,943,50 | 4.99 |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 808,517,437,098,63 | 852,741,747,296,63 | 931,772,346,647,00 | 968,350,414,358,00 | 1,056,038,415,841,00 | 5.54 |
| 1.3.5 | Aset tetap lainnya | 2,452,092,994,50 | 2,915,735,373,50 | 11,203,111,551,00 | 12,069,189,651,00 | 16,634,603,906,00 | 69.73 |
| 1.3.6 | Kontruksi dalam Pengerjaan | 18,702,086,199,00 | 33.225.595.550.00 | 33,547,342,506,00 | 104,873,939,801,00 | 130,879,392,059,00 | 63.2 |
| .1.3.7 | Akumulasi Penyusutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 | dst....... |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **ASET LAINNYA** | 36,532,269,389,19 | 1,673,887,500,00 | 2,289,301,700,00 | 1,406,040,600,00 | 18,840,774,062,00 |  |
| 1.3.1 | Tagihan Penjualan Angsuran | 880,980,925,00 | 136,153,000,00 | 0 | 0 | 0 | -42.27 |
| 1.3.2 | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 34,252,773,964,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Kemitraan dengan Pihak Kedua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Asettakberwujud | 1,398,514,500,00 | 1,537,734,500,00 | 1,414,354,500,00 | 652,145,000,00 | 1,504,747,900,00 | 15.75 |
| 1.3.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.6. | set Lain-lain | 0 | 0 | 874,947,200,00 | 753,895,600,00 | 17,336,026,162,00 | 728.56 |
|  | **JUMLAH ASET DAERAH** | 1,478,210,507,443,30 | 1,564,775,802,968,52 | 1,681,956,202,787,50 | 1,848,943,633,140,35 | 2,050,435,987,802,92 |  |
| 2. | **KEWAJIBAN** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | 20,678,759,588,00 | 42,763,607,194,00 | 16,086,298,656,00 | 19,991,852,127,00 | 17,749,968,603,00 |  |
| 2.1.1. | Utang Perhitungan Pihak Ketiga | 18,205,478,00 | 198,493,190,00 | 4,870,043,00 | 41,971,516,00 | 720,880,00 | 350 |
| 2.1.2. | Utang Bunga, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Utang Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Utang pada Pihak III | 20,660,554,110,00 | 4,656,165,104,00 | 7,444,478,473,00 | 19,463,695,611,00 | 17,749,247,723,00 | 27.01 |
| 2.1.5 | Utang jangka pendek lainnya | 0 | 18,954,474,449,00 | 4,318,475,070,00 | 486,185,000,00 | 0 | -55.32 |
| 2.1.6. | Utang pada Pemerintah pusat | 0 | 18,587,306,953,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.7. | Utang pada pemerintah Desa | 0 | 367,167,498,00 | 439,820,300,00 | 0 | 0 | 9.89 |
| 2.1.8. | Utang lainnya | 0 | 0 | 3,878,654,770,00 | 0 | 0 |  |
| 2.1.9. | Utang Jangka Pendek Lainnya-Jasa Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Utang Kepada Pemerintah Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | **EKUITAS DANA LANCAR** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | SILPA | 6,929,698,380,08 | 10,326,772,514,72 | 34,990,871,944,20 | 47,182,512,146,53 | 62,929,485,234,20 | 71.21 |
| 3.1.2. | Cadangan piutang | 10,522,573,894,86 | 11,153,416,769,13 | 11,374,649,107,12 | 11,570,619,156,73 | 9,815,039,360,37 | -1.09 |
| 3.1.3. | Cadangan persediaan | 2,879,011,065,00 | 8,602,598,596,50 | 6,591,156,111,25 | 7,648,891,668,90 | 17,540,938,339,67 | 63.76 |
| 3.1.4. | Pendapatan yang ditangguhkan | 846,600,00 | 25,715,150,00 | 2,347,000,00 | 1,639,000,00 | 510,340,400,00 | 6,770.59 |
| 3.1.5. | Danayangharusdisediakanu/pembay.Utg.Jk.Pendek | (20,660,554,110,00) | ( 23,610,639,553,00) | (11,762,953,543,00) | (19,952,880,611,00) | (17,749,247,723,00) | 4.53 |
| 3.2. | **EKUITAS DANA INVESTASI** |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Diinvestasikan dalam aset tetap | 1,378,268,815,791,17 | 1,478,927,869,403,17 | 1,575,528,720,975,73 | 1,725,806,766,860,68 | 1,885,567,555,097,68 | 7.81 |
| 3.2.2. | Diinvestasikan dalam aset lainnya | 36,532,269,369,19 | 1,673,887,500,00 | 2,289,301,700,00 | 1,406,040,600,00 | 18,840,774,062,00 | 228.55 |
| 3.2.3. | Diinvestasikan dlm inves jangka panjang | 43,062,086,845,00 | 53,867,047,845,00 | 51,174,258,904,00 | 55,285,192,191,50 | 55,231,134,429,00 | 5.61 |
| 3.2.4 | JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI | 1,457,863,172,025,36 | 1,534,468,804,748,17 | 1,628,992,281,579,73 | 1,782,497,999,652,18 | 1,959,639,463,588,68 |  |
|  | **JUMLAH EKUITAS DANA** | 1,457,531,747,855,30 | 1,540,966,670,255,52 | 1,669,500,189,674,30 | 1,828,948,781,013,34 | 2,032,686,019,199,92 |  |
|  | **Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana** | 1,478,210,507,443,3 | 1,478,210,507,443,3 | 1,681,956,202,787,30 | 1,848,943,633,140,40 | 2,050,435,987,802,92 |  |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan)

Alokasi anggaran belanja tidak langsung diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah,belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk membiayai belanja barang dan jasa serta belanja modal. Alokasi anggaran belanja langsung diperuntukkan membiayai pengadaan tanah, peralatan dan mesin,gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, konstruksi dan asset lainnya. Dari keseluruhan komponen belanja langsung, alokasi anggaran yang terbesar adalah pembiayaan jalan, irigasi dan jaringan.

Berdasarkan tabel 3.20 menunjukkan asset lancar tahun 2010 – 2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 kas lancar, sebesar Rp. 20.347.335.417,94,-tahun 2011, sebesar Rp.30.306.998.220,35,-, tahun 2012, sebesar Rp.52.963.921.207,57, tahun 2013, sebesar Rp.66.445.633.488,16,-, dan pada tahun 2014 kas lancar, sebesar Rp.90.776.524.214,24,-. Rata-rata pertumbuhan kas lancar sekitar 22,34 % pertahun. Peningkatan kas lancar diimbangi pula dengan peningkatan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek pada tahun 2010 sebesar Rp. 20.678.759.588,- tahun 2011 meningkat menjadi, sebesar Rp. 42.763.607.194,- tahun 2012 turun menjadi, sebesar Rp.16.086.298.656,- . Dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek pada tahun 2012, maka pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 19.991.852.127,-. Pada tahun 2014 kewajiban jangka pendek menurun menjadi Rp. 17.749.247.723,- dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun 2013. Rata rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek mencapai angka sekitar 11,52 % per tahun.

Berdasarkan pada tabel 3.20 menunjukkan aset tetap cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 nilai asset tetap, sebesar Rp. 1.378.268.815.791,10,-, tahun 2011 sebesar Rp 1.478.927.869.403,17,- atau meningkat sekitar 7,3 % dibandingkan tahun 2010. Tahun 2012 asset tetap, sebesar Rp.1.575.528.720.975,73,- atau meningkat sekitar 6,53 % dibandingkan tahun 2011. Tahun 2013 asset tetap, sebesar Rp.1.725.806.766.860,68,- atau meningkat sekitar 9,54 % dibandingkan tahun 2012. Tahun 2014 asset tetap, sebesar Rp. 1.885.567.555.097,68,- atau meningkat, sekitar 9,26 % dibandingkan perolehan asset pada tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan asset tetap sekitar 7,81 % per tahun.

Tabel 3.21

Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Selayar

Periode 2012 – 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **URAIAN** | **2012** | **2013** | **2014** |
| **A** | **Belanja tdk langsung** | 267.608.211.611, | 289.892.037.684. | 302.219.978.280. |
| 1 | Belanja Pegawai | 222.453.437.470. | 241.078.708.261. | 260.394.469.278. |
| 2 | Belanja Bunga | 00 | 00 | 00 |
| 3 | Belanja Subsidi | 225.000.000. | 547.846.743. | 00 |
| 4 | Belanja Hibah | 2.606.925.000. | 00 | 00 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 33.500.000. | 1.237.035.000. | 00 |
| 5 | Belanja Bagi hasil | 00 | 00 | 00 |
| 6 | Belanja Bantuan Keuangan | 40.603.520.116. | 47.028.447.680. | 41.445.687.602. |
| 7 | Belanja Tak Terduga | 1.685.829.025. | 300.000.000. | 379.821.400. |
| **B** | **Belanja Langsung** | 209.685.819.072. | 302.795.963.368. | 351.403.398.286. |
| 1 | Pegawai | 42.066.520.778. | 54.179.005.134. | 59.732.329.179. |
| 2 | Belanja Barang dan jasa | 82.541.080.894. | 92.848.801.249. | 122.905.606.991. |
| 3 | Belanja Modal | 85.078.217.400. | 155.768.156.985. | 168.765.462.116. |
| **-** | **Belanja tdk langsung & Langsung** | 477.294.030.683. | 592.688.001.052. | 653.623.376.566. |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

Belanja tidak langsung dalam tiga tahun terakhir cederung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 belanja tidak langsung meningkat 8,33 % dibandingkan belanja tidak langsung pada tahun 2012. Pada tahun 2014 belanja tidak langsung meningkat sekitar 4,25 % dibandingkan dengan belanja tidak langsung pada tahun 2013. Rata rata pertumbuhan belanja tidak langsung sekitar 2,44 % pertahun.

Belanja langsung cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir. Peningkatan belanja langsung pada tahun 2013 mencapai angka sekitar 44,40 % dibandingkan dengan belanja langsung pada tahun 2012. Belanja langsung pada tahun 2014 meningkat sekitar 16,05 % dibandingkan dengan belanja langsung pada tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung 20,5 % pertahun.

Jika dilihat rasio kontribusi belanja langsung terhadap total belanja pada tahun 2012 berada pada kisaran sekitar 56,07 %, tahun 2013 sekitar 48,91 %,dan tahun 2014 sekitar 46,24 %. Kontribusi belanja tidak langsung terhadap total belanja pada tahun 2012 mencapai angka sekitar 43,93 %, tahun 2013 sekitar 51,09 %, dan tahun 2014 mencapai angka sekitar 57,07 %.

Jika dibandingkan kontribusi belanja tidak langsung dengan belanja langsung terhadap total belanja daerah, serta perkembangan belanja langsung dengan belanja tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2012 belum mengarah pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, karena rasio belanja langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayarlebih besar dari belanja tidak langsung yan mencapai angka sekitar 56,07 % dari total belanja, sedangkan belanja barang, dan jasa, serta modal, hanya mencapai angka 43,93 % dari total belanja. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat baru nampak pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 komponen belanja lansung mencapai angka sekitar 51,09 % lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung yang mencapai angka 48,91 %. Pada tahun 2014 komponen belanja langsung mencapai angka sekitar57,07 % dan belanja tidak langsung hanya mencapai 43,93 %.

Tabel 3.22

Analisa Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **U r a i a n** | **2012** | **2013** | **2014** | **Simbol** |
| 1 | Rasio lancar (current ratio)  Aktiva Lancar : Hutang lancar | 3,029 | 3,32 | 5.11 | >1 |
| 2 | Rasio quick (quick ratio)  Aktiva Lancar – Dana cadangan : hutang jangka pendek | 2,88 | 2,94 | 4,13 | >1 |
| 3 | Solvabilitas | | | | |
| 3a | Rasio Total Hutang terhadap total aset | 0,010 | 0,011 | 0,009 | <0,5 |
| 3b | Rasio total hutang terhadap total Ekuitas | 0.009 | 0,010 | 0,008 | <0,5 |

Sumber data : Hasil Olahan

Tabel 3.22 diatas menjelaskan bahwa rasio lancar pada tahun 1012 – 2014 mencapai angka 3,029 – 5,11 berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mampu menyelesaikan pinjaman jangka pendek dalam kurun waktu satu tahun. Kondisi ini memberi gambaran bahwa sekalipun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bermaksud meminjam Satu Rupiahuntuk meningkatkan asset, maka Pemerintah Kabupaten Kepuauan Selayar masih mampu menjamin pinjaman yang dimaksud sekitar 2,029rupiah - 4,11rupiah.

*Quik rasio* memberikan gambaran kemampuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memenuhi hutang jangka pendek sekalipun dana cadangan dikeluarkan dari kas lancar atau semata mata menggunakan aktiva lancar. Artinya jika Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memimjam satu rupiah, maka pinjaman tersebut dapat dijamin sekitar 1,88rupiah – 3,13rupiah.

*Solfabilitas* merupakan instrumen pemerintah daerah yang menggambarkan rasio total hutang terhadap total asset daerah dan total hutang terhadap ekuitas. Kedua instrumen tersebut menunjukkan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2012 – 2014 yang mencapai angka 0,009 – 0,011 dan 0,008 – 0,010. Kedua angka instrumen tersebut dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup sehat karena *solfabilitas* masih berada di bawah 0,5. Angka tersebut dapat juga diartikan bahwa sekalipun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kekurangan pembayaran, Pemerintah Daerah masih mampu menutupi kekurangan keuangan dengan melepaskan sebagian asset.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Selayar periode 2012 – 2014 cukup sehat. Kondisi ini perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada periode 2016 – 2021.

* 1. **Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Periode Lalu**

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu memberikan informasi tentang arah peningkatan pendapatan daerah, arah belanja daerah dan kebijakan pembiayaan defisit, berimbang dan surflus. Informasi ini sangat penting sebagai acuan bagi pemerintah untuk mengarahkan roda pemerintahan lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang berbasis kinerja dengan tetap mengedepankan prinsif efisiensi, efektivitas, transparan, adil dan akuntabel sampai akhir periode lima tahun mendatang. Arah kebijakan pengelolaan keuangan diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

**3.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah yang selama ini berjalan relatif lamban dengan rata-rata pertumbuhan 8,9 % pertahun, angka tersebut kebetulan sama dengan rata rata angka pertumbuhan PDRB berdasarkan harga berlaku, sedangkan pendapatan asli daerah rata-rata tumbuh 30,36 % pertahun.Penyelenggaraan pemerintahan lima tahun mendatang diharapkan terjadi pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan PDRB terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, artinya elastisitas PDRB terhadap PAD mampu meningkakan penerimaan PAD dengan asumsi jika PDRB meningkat 1 % maka PAD akanmeningkat sekitar 3,37 % pertahun. Derajat otonomi fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mengalami peningkatan dari 2 –5,35 % pada periode 2010 - 2015 menjadi 5,5–12,01 %, dari total pendapatan daerah pada periode tahun 2016 - 2021. Artinya pada akhir periode pemerintahan kemandirian Kabupaten Kepulauan Selayar keluar dari zona sangat kurang bergeser ke zona kurang. Pemaparan berikut menggambarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan pendapatan daerah.

* + - 1. **Pendapatan Asli Daerah**

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui:

1. Penyusunan perencanaan pendapatan asli daerah perlu dilakukan analisis potensi masing-masing sumber PAD dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhinya;
2. Peningkatan pendapatan asli daerah diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Guna memenuhi maksud tersebut diperlukan penyederhanaan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dan sekaligus membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan sumber sumber pendapatan asli daerah;
3. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PBB, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan BPHTB;
4. Dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat diberikan biaya pungut maksimal sekitar 5 % dari realisasi pungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
5. Malakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba perusahan daerah dan hasil pembagian deviden atas penyertaan modal investasi daerah kepada perusahaan yang memiliki kondisi keungan yang sehat dan dapat dipercaya. Pemerintah Daerah dimungkinkan memanfaatkan asset untuk dikerjasamakan dengan pihak pihak lain berdayaguna dan menghasilkan pendapatan.
   * + 1. **Dana Perimbangan**.

Dana perimbangan merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah. Dana perimbangan terdiri dari dua sumber yaitu DAU dan DAK. DAUdigunakan untuk pembayaran gaji pegawai, sedangkan DAK digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Tuntutan kebutuhan publik bergerak dengan cepat maka Pemerintah Daerah harus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah untuk memperoleh alokasi anggaran DAK sesuai kebutuhan dalam rangka pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

* + - 1. **Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan sumbangan atau bantuan yang sipatnya tidak mengikat. Sumber penerimaan dalam kategori ini, antara lain bagi hasil pajak dan bukan pajak, bantuan keuangan, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. Terkait dengan penerimaan bantuan berupa hibah dari pihak ketiga harus dibuktikan dengan surat keterangan hibah antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemberi hibah tanpa mengurangi beban kewajiban pihak pemberi hibah terhadap Pemerintah Daerah. Besaran hibah harus direncanakan dan tertuang didalam APBD.

* + 1. **Kebijakan Belanja Daerah.**

Kebijakan belanja daerah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Belanja daerah terdiri dari dua komponen utama yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja tidak langsung mencakup belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sedangkan belanja lansung adalah keseluruhan belanja barang dan jasa serta belanja modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tabel 3.23 dan tabel 2.4. dibawah ini.

Tabel 3.23

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2012 Anggaran** | **2012 Realisasi** | **2012 (%)** | **2013 Anggaran** | **2013 Realisasi** | **2013 (%)** | **2014 Anggaran** | **2014 Realisasi** | **2014 (%)** |
| **A** | **Belanja Tidak Langsung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Belanja Pegawai | 186.988.190.266.00 | 186.988.190.266,00 | 100 | 197.933.214.240,00 | 197.933.214.240,00 | 100 | 207.476.359.765,00 | 207,476,359,765,00 | 100 |
| 2 | Belanja Bunga | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Belanja Subsidi | 225.000.000 | 225.000.000 | 100 | 547.846.743 | 547.848.743 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4 | Belanja Hibah | 2.606.925.000 | 2.606.925.000 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 33.500.000 | 33.500.000 | 100 | 1.237.035.000 | 1.237.035.000 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6 | Belanja Bagi Hasil | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan | 40.603.520.116 | 40.603.520.116 | 100 | 47.028.447.680 | 47.028.447.680 | 100 | 41.445.687.602 | 41,445,687,602 | 100 |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | 1.685.829.025 | 1.685.829.025 | 100 | 300.000.000 | 300.000.000 | 100 | 379,821,400 | 379,821,400 | 100 |
| **B** | **Belanja Langsung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Belanja Pegawai | 42.066.520.116 | 42.066.520.116 | 100 | 54.179.005.134 | 54.179.005.134 | 100 | 59,732,329,179 | 59,732,329,179 | 100 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 82.541.080.894 | 82.541.080.894 | 100 | 92.848.801.249 | 92.848.801.249 | 100 | 122,905,606,991 | 122,905,606,991 | 100 |
| 3 | Belanja Modal | 85,078,217,400 | 85,078,217,400 | 100 | 155.768.156.985 | 155.768.156.985 | 100 | 168,765,462,116 | 168,765,462,116 | 100 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

Tabel 3.24

Analisa Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **o** | **URAIAN** | **Total Belanja Untuk**  **Pemenuhan Kebutuhan**  **Aparatur** | **Total pengeluaraan (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)**  **(Rp)** | **Presentase** |
| **(a)** | **(b)** | **(a) / (b) x 100 %** |
| 1 | Tahun Anggaran 2012 | 264,519,598,248,00 | 481,230,172,668,72 | 54,96 |
| 2 | Tahun Anggaran 2013 | 295,257,713,395,00 | 596,611,751,052,00 | 49,49 |
| 3 | Tahun Anggaran 2014 | 320,126,798,457,00 | 654,565,983,466,00 | 48,91 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

Rasio pemenuhan kebutuhan pegawai terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun mendekati posisi ideal antara 40 – 45 % dari total belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Posisi rasio belanja pegawai terhadap total pengeluaran pada tahun 2012 masih diatas 50 %, artinya belanja pegawai lebih besar dari pada belanja kebutuhan publik. Pada tahun 2013 belanja pemenuhan kebutuhan pegawai menurun sekitar 5,47 %dari belanja pegawai pada tahun 2012, atau belanja pegawai hanya sekitar 49,49 %, ini berarti posisi belanja publik dan belanja modalberada dikisaran 51,51 %. Pada tahun 2014 belanja pegawai turun sekitar 6,05 % dibandingkan dengan belanja pegawai pada tahun 2012atau sekitar 48,91 % sedangkan belanja publik, dan belanja modal berada pada kisaran 51,09 % . Artinya belanja pemenuhan kebutuhan pegawai terus bergerak turun kearah posisi ideal sedangkan belanja publik cenderung meningkat.Ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selalu berupaya mendorong peningkatan belanja publik dan belanja modal dan menekan belanja pegawai.

Arahan kebijakan belanja daerah di masa lalu tetap menjadi arahan kebijakan pada periode 2016-2021 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Arah kebijakan belanja akan diarahkan, pada :

1. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja mengikat daerah berupa belanja gaji pegawai dan belanja tidak langsung lainnya dengan ranger antara 40-45 % pertahun;
2. Meningkatkan proporsi belanja langsung khususnya belanja modal pada kisaran 55 – 60 % pertahun;
3. Memenuhi proporsi belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan sesuai prioritas pembangunan.
4. Prioritas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja pemenuhan kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
6. Alokasi penggunaan dana perimbangan diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya.
7. Alokasi belanja pegawai diarahkan pada belanja pegawai negeri sipil, tenaga honorer, dan belanja anggota DPRD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Upayamengantisipasi kejadian yang tidak terduga dan mengancam stabilitas sosial masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga atau melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda untuk membiayai kondisi darurat.
9. Alokasi Bantuan Sosial akan dilakukan dengan selektif, sehingga sasaran dan peruntukannya tepat dan jelas.
   * 1. **Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan daerah menjelaskan tentang kebijakan anggaran pada masa pemerintahan yang lalu. Gambaran yang diharapkan adalah, apakah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menganut anggaran surplus, berimbangdan defisit. Informasi tersebut menjadi referensi untuk menetapkan arah kebijakan anggaran pada masa pemerintahan lima tahun mendatang. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada upaya pencapaiaan keseimbangan antara pendapatan dengan belanja.

* + 1. **Analisis Pembiayaan Daerah**

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintahan daerah periode 2016-2021 utamanya yang terkait dengan perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui besaran pendanaan pembangunan, maka kondisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah akan menjelaskan apakah anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalami surplus, berimbang dan defisit selama pemerintahan yang lalu.

* + - 1. **Surplus/Defisit**

Dengan memperhatikan pendapatan belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir, maka gambaran surplus/defisit dalamanggaran daerah dapat diketahui. Penetapan kebijakan anggaran yang defisit atau surplus seringkali tidak sama dengan realisasi. Masa pemerintahan sebelumnya, penetapan APBD di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2010 dan 2011 mengalami defisit. Artinya rencana alokasi belanja lebih besar daripada rencana pendapatan daerah. Akan tetapi pada akhir periode neraca tahun 2010 dan 2011 justru mengalami surplus. Selama periode 2012-2014, posisi transaksi keuangan dalam keseimangan. Pada tahun 2012 diperoleh Silpa, sebesar Rp.24.484.510.960,-. Pada tahun 2013 diperoleh Silpa sebesar Rp. 11.421.689.860,-, tahun 2014 diperoleh, sebesar Rp. 15.653.116.283,67,-. Rata-rata pertumbuhan Silpa periode 2012 – 2014 mencapai angka sekitar 31,08 % per tahun. Silpa diperoleh dari penghematan pembiayaan, yaitu: pada tahun 2012 terjadi penghematan sebesar Rp.6.570.047.063,72, tahun 2013 sebesar Rp.31.604.357.092,20,- dan pada tahun 2014 terjadi sebesar Rp.47,276,368,950,53,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) Riil Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun Anggaran 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2012** | | **2013** | | **2014** | | **Rata-rata Pertumbuhan \*)** |
| **Rp** | **% dari SILPA** | **Rp** | **% dari SILPA** | **Rp** | **% dari SILPA** |
| 1. | Jumlah SILPA | 24.484.510.960 | 140,62 | 11.421.689.860 | 53,35 | 15.653.116.283.67 | 37,04 | 31,08 |
| 2. | Pelampauan penerimaan PAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 6.570.047.063,72 |  | 31.604.357.092,20 | 381,04 | 47.276.368.950,53 | 49,58 | 143,54 |
| 6. | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | kegiatan lanjutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

* + - 1. **Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan**

Pembiayaan dalam penganggaran daerah adalah penerimaan atau pengeluaran yang dialokasikan untuk mewujudkan keseimbangan neraca daerah. Dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar sepanjang tahun 2012-2014 diperoleh gambaran bahwa tingkat realisasi penerimaan pembiayaan daerahtahun 2012 diperoleh Silpa sebesar Rp.10,326,772,514,72,-, tahun 2013 sebesar Rp. 34,018,420,381,20,-, tahun 2014, sebesar Rp.47,182,512,146,33,-. Rata rata pertumbuhan Silpa, sekitar 89,23 % pertahun dengan menggunakan tahun dasar 2012.Angka tersebut dapat pula diartikan bahwa rata-rata pembiayaan nettto Kabupaten Kepulauan Selayar, sebesar Rp.30.629.029.008,82 ,-pertahun. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berhasil memperoleh penerimaan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumya(SILPA).

Tabel 3.26

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **URAIAN** | **2012**  **(Rp)** | **2013**  **(Rp)** | **2014**  **(Rp)** |
| 1. | Realisai Pendapatan Daerah | 505.714,683,628,48 | 608,033,440,912,00 | 670,219,099,749,67 |
|  | Dikurangi realisasi |  |  |  |
| 2. | Belanja Daerah | 477,293,858,748,00 | 594,111,751,052,00 | 654,565,983,466,00 |
| 3. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 3,936,313,920,00 | 2,500,000,000,00 | 0 |
| **A** | **Surplus** | 24,484,510,960,48 | 11,421,689,860 | 15,653,116,283,67 |
|  | Ditutup oleh realisasi Penerimaan  Pembiayaan: | 6,570,047,063,72 | 34,104,420,381,20 | 47,276,368,950,53 |
| 4. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)  Tahun Anggaran sebelumnya | 10,326,772,514,72 | 34,018,420,381,20 | 47,182,512,146,,33 |
| 5. | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 180,556,169,00 | 85,936,711,00 | 93,856,804,00 |
| 9. | Penerimaan Piutang Daerah |  |  |  |
| **B** | **Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah** | 10,506,360,983,72 | 34,104,357,092,20 | 47,276,368,950,53 |
| **A+B** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan** | 34,990,871,944,20 | 45,526,046,952,53 | 62,929,485,234,20 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi APBD periode 2012 - 2014, menunjukkan kondisi neraca yang sehat. Periode neraca tahun 2012- 2014menghasilkan Silpasetiap akhir tahun anggaran. Ini berarti Pengelola keuangan mampu melakukan pengendalian kas dan pembiayaan, sehingga posisi neraca tetap berada dalam kondisi berimbang sampai surplus. Surplus pembiayaan pada tahun 2012 mencapai angka, sebesar Rp.34.990.871.944,20,-. Pada tahun 2013 diperoleh Silpa sebesar Rp.45.526.046.952,53,-, dan tahun 2014 sebesar Rp. 62.929.485.234,20,-. Rata-rata pertumbuhan Silpa, sekitar 22,78 % per tahun. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar lima tahun mendatang diharapkan mempertahankan dan atau meningkatkan posisi neraca keuangan ke kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Tabel 3.27

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **URAIAN** | **Proporsi dari total defisit rill** | | |
| **2012**  **(Rp)** | **2013**  **(Rp)** | **2014**  **(Rp)** |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 10,325,804,814,72 | 34,990,871,944 | 45,526,046,952,53 |
| 2. | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisakan | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 180,556,169,00 | 85,936,711,00 | 93,856,804,00 |
| 6. | Penerimaan Piutang Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | 34,990,871,944,20 | 45,526,046,952,53 | 62,929,485,234,20 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

Berdasarkan tabel 3.27 diatas menggambarkan tujuh komponen sumber pendapatan yang mampu penutup defisit rill. Ke tujuh komponen tersebut hanya tiga komponen yang mempunyai pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenaan.Pada tahun 2012, Silpa yang digunakan untuk menutup defisit, sebesar Rp.10.325.804.814.72,-, tahun 2013, sekitar Rp.34.990.871.944,-, dan tahun 2014 sebesar Rp.45.526.046.952.53,-. Komponen penutup defisit berikutnya adalah penerimaan kembali pinjaman daerah; Pada tahun 2012 pengembalian pinjaman daerah sebesar Rp.180.556.169,-, tahun 2013 sebesar Rp. 85.936.711,-, dan tahun 2014 sebesar Rp. 93.856.804,-. Komponen yang potensial digunakan sebagai penutup defisit lainnya adalah sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenaan pada tahun 2012 diperoleh Silpa sebesar Rp.34.990.871.994,20,-, kemudian tahun 2013 sekitar Rp.45.526.046.952.53,- dan pada tahun 2014 sekitar Rp.62.929.485.234.20,-

Tabel 3.28

Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2012 – 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **URAIAN** | **2012 (Rp)** | **2013 (Rp)** | **2014 (Rp)** |
| 1. | Saldo kas neraca daerah | 34,990,871,944,20 | 45,526,046,952,53 | 62,929,485,234,20 |
|  | **Dikurangi:** |  |  |  |
| 2. | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kegiatan lanjutan | 0 | 0 | 0 |
|  | **Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran** | 34,990,871,944,20 | 45,526,046,952,53 | 62,929,485,234,,20 |

Sumber Data : Hasil Olahan

Tabel 3.28 menunjukkan bahwa sisa lebih rill pembiayaan anggaran tahun berkenaan cenderung meningkat setiap tahun. Periode neraca 2012 – 2014 menggambarkan bahwa pada Tahun 2012 diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran, sebesar Rp.34.990.871.944,2.-, tahun 2013 sebesar Rp.45.526.046.952,53,-, dan pada tahun 2014 sebesar Rp.62.929.485.234,20.,-

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah khususnya aspek analisis pembiayaan, sebagai berikut :

1. Periode neraca 2012 – 2014 tidak terjadi defisit anggaran.
2. Jika terjadi defisit anggaran, maka kebijakan menutup defisit menggunakan Silpa yang diperoleh tahun sebelumnya.
3. Silpa yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan sebagai dana penyertaan pada lembaga keuangan negara yang memiliki kondisi likuiditas yang baik. Tujuan penyertaan modal pada lembaga keuangan negara adalah untuk memperoleh pembagian deviden sebagai salah satu potensi sumber pendapatan daerah khususnya pada komponen penerimaan lain- lain PAD yang sah.
   1. **Kerangka Pendanaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tetang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kerangka pendanaan, adalah pembiayaan program dan kegiatan yang disusun sedemikian rupa untuk mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan. Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2021. Kemampuan kapasitas riil keuangan daerah merupakantotal penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Tabel 3.29

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Data Tahun Dasar 2014** | **2012-2013** | **2013-2014** | **Tingkat Pertumbuahan (%)** | **Proyeksi** | | | | | | |
| **2015** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| **A** | **Belanja Tidak Langsung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 258,785,700,265 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 267,584,414,074 | 357,145,954,700 | 377,166,214,000 | 389,989,865,276 | 403,218,500,695 | 416,927,929,719 | 431,103,479,329 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 1,260,000,000 | 33.58 | 0 | 11.19 | 1,260,000,000 | 1,260,000,000 | 1,260,000,000 | 1,260,000,000 | 1,260,000,000 | 1,260,000,000 | 1,260,000,000 |
| 3 | Biaya Pemungutan Pajak Daerah | 50.798,996,00 | 167.7 | 71.8 | 79.83 | 91,351,834 | 265,985,000 | 265,985,000 | 285,871,000 | 329,064,350 | 361,770,760 | 398,762,276 |
| 4 | Belanja Bunga \* |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Belanja Bagi Hasil \* | 41,445,687,602 | 15.8 | 11.9 | 923.00% | 41,992,770,678 | 96,715,688,412 | 106,034,068,236 | 116,251,834,848 | 126,981,879,204 | 138,702,306,655 | 152,322,430,155 |
| 6 | Bantuan Partai Politik | 519,624,605,00 |  |  |  | 519,624,605 | 519,624,605 | 519,624,605 | 519,624,605 | 519,624,605 | 519,624,605 | 519,624,605 |
| 7 | Belanja Hibah/ Bansos |  |  |  |  |  |  | 19,570,000,000 | 20,527,600,000 | 25,550,000,000 | 21,550,000,000 | 31,550,000,000 |
| **B** | **Belanja Langsung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Belanja Jasa Kantor | 26,364,726,024 | 2 | 78.6 | 26.87% | 33,448,927,906 | 42,436,654,834 | 53,839,383,988 | 68,306,026,465 | 86,659,855,777 | 109,945,359,024 | 139,487,676,994 |
| 2 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Subsidi |  |  |  |  |  |  | 3,420,000,000 | 3,420,000,000 | 3,420,000,000 | 3,420,000,000 | 3,420,000,000 |
| **C** | **Pengeluaran Pembiayaan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pembayaran Bunga Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pembayaran Utang Pihak Ketiga-Rekanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | \* Penyertaan Modal ( PT. Bank Sulselbar )\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA** | 328,426,537,492. | 0 | 0 | 0 | 344,897,089,097 | 498,343,907,551 | 564,575,275,829 | 597,140,822,194 | 644,518,924,632 | 694,766,990,763 | 759,641,973,359 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

Tabel 3.30

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Keuangan Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Data Tahun Dasar 2014 (Rp)** | **2012-2013** | **2013-2014** | **Tingkat Pertumbuahan (%)** | **Proyeksi** | | | | | | |
| **2015** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1. | Pendapatan | 670,219,099,749.67 | 20.14 | 10.23 | 10.12 | 722,528,690,000.00 | 898,010,424,020.00 | 981,699,392,122.00 | 1,077,144,747,684.00 | 1,184,626,441,652.00 | 1,297,711,599,517.00 | 1,423,449,062,468.00 |
| 2. | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 62,929,485,234.20 | 30.11 | 38.23 |  | 9,500,000,000.00 | 56,456,104,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah(PIP) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Penerimaan | 733,148,584,983.87 |  |  |  | 732,028,690,000.00 | 954,466,528,767.00 | 981,699,392,122.00 | 1,077,144,747,684.00 | 1,184,626,441,652.00 | 1,297,711,599,517.00 | 1,423,449,062,468.00 |
|  | **Dikurangi:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama | 328,426,537,492 |  |  |  | 344,846,882,887 | 498,343,907,551 | 564,575,275,829 | 597,140,822,194 | 644,518,924,632 | 694,766,990,763 | 759,641,973,359 |
|  | **Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan** | 404,722,047,491,87 |  |  |  | 387,181,807,113 | 456,122,621,216.00 | 420,544,116,293.10 | 480,003,925,490 | 540,107,517,020.44 | 602,944,608,754.42 | 663,807,089,108.92 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

Untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan perioritas utama Kabupaten Kepulauan Selayar pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah.

Tabel 3.31

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2015 – 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Proyeksi** | | | | | | |
| **2015** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| **I** | **Kapasitas riil kemampuan keuangan** | 387,181,807,113 | 456,122,621,216.00 | 420,544,116,293.10 | 480,003,925,490 | 540,107,517,020.44 | 602,944,608,754.42 | 663,807,089,108.92 |
| II.a | Belanja Langsung | 349,974,744,000.00 | 277,523,816,833 | 357,013,578,737 | 409,270,653,168.11 | 463,131,834,358.00 | 515,959,474,310.00 | 570,620,378,289 |
| II.b | Pembentukan dana cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | dikurangi: |  |  |  |  |  |  |  |
| II.c | Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | 33,448,927,906 | 43,147,754,834 | 54,550,483,987 | 69,017,126,464 | 87,370,955,774 | 110,282,106,492 | 139,690,964,634 |
| II | **Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)** | 317,524,640,294 | 234,376,061,999.00 | 299,463,094,750 | 340,253,526,704.11 | 375,760,878,584.00 | 405,677,367,818.00 | 430,929,413,655 |
|  | Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) | 69,657,166,819.00 | 221,746,559,217.00 | 117,661,021,542.90 | 139,750,398,785.44 | 164,346,638,436.44 | 197,267,240,936.42 | 232,877,675,453.92 |
|  | Rencana alokasi pengeluaran prioritas |  |  |  |  |  |  |  |
| III.a | Belanja Tidak Langsung | 344,846,822,887 | 498,343,907,551 | 564,575,275,829 | 597,140,822,194 | 644,518,924,632 | 684,766,990,763 | 759,641,973,359 |
|  | dikurangi: |  |  |  |  |  |  |  |
| III.b | Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | 311,397,955,981 | 372,020,247,012 | 510,735,891,841 | 528,834,795,729 | 557,859,068,855 | 584,821,631,739 | 620,154,296,365 |
| **III** | **Total rencana pengeluaran Prioritas II (III.a-III.b)** | 33.448.866.906,- | 126,323,660,539 | 53,839,383,988 | 68,306,026,465 | 86,659,855,777 | 109,945,359,023.91 | 139,487,676,994 |
|  | **Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)\*** | 36,208,299,913.00 | 95,422,898,678.00 | 63,821,637,555.00 | 71,444,372,320.00 | 77,686,782,659.73 | 87,321,881,912.51 | 93,389,998,460.29 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

**3.4.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama**

Belanja yang sifatnya wajib adalah belanja yang harus dianggarkan setiap tahun. Komponen belanja tidak langsung cenderung meningkat setiap tahun karena peningkatan jumlah pegawai, tunjangan jabatan, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dari tahun 2012 – 2014 mencapai angka2,44 % pertahun.

Komponen belanja tidak langsung pembiayaan yang menyerap anggaran paling besar adalah belanja pegawai yang mana pada tahun 2012 sebesar Rp.186. 988.190.266,-, tahun 2013 sebesar Rp.197.933.214.240,-, dan tahun 2014 sebesar Rp.207.476.359.765,- . Rata rata pertumbuhan gaji dan tunjangan mencapai angka sekitar 3,56 % per tahun.Penyerapan anggaran terbesar kedua pada komponen belanja tidak langsung adalah belanja bantuan keuangan; Pada tahun 2012 sebesar Rp.40.603.520.116,-, tahun 2013 sebesar Rp. 47.028.447.680,-, dan pada tahun 2014, sebesar Rp.41.445.687.602,- atau tumbuh rata-rata sekitar 3,95 % per tahun.

Belanja langsung cenderung meningkat dan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung periode 2012-2014 mencapai angka, sekitar 20,5 % pertahun. Belanja langsung yang wajib dibayar bertumbuh dengan rata-rata, sekitar 26,87 % pertahun. Komponen belanja langsung wajib adalah belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya). Pada tahun 2012 kewajiban belanja jasa kantor, sebesar Rp.14.467.129.163,-, tahun 2013 sebesar Rp.14.762.185.470,-, dan pada tahun 2014 sebesar Rp.23.647.260.240,-. Rata-rata peningkatan belanja jasa kantor sekitar 26,87 % pertahun. Belanja langsung wajib mengikat lainnya adalah beasiswa bagi PNS pada tahun 2012 sebesar Rp.540.000.000,-, tahun 2013 sebesar Rp. 337.400.000,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp.226,400,000,-. Rata-rata tumbuh, sekitar 19,51 % per tahun. Untuk lebih jelasnya lihat tabel,sebagai berikut :

Tabel 3.32

Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2012 – 2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2012 (Rp)** | **2013 (Rp)** | **2014 (Rp)** | **Rata-rata Pertumbuhan (%)** |
| **A** | **Belanja Tidak Langsung** |  |  |  |  |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 186.988.190.266,00 | 197.933.214.240,00 | 207.476.359.765,00 | 3,56 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 1.897.218.960,00 | 1.260.000.000,00 | 1.260.000.000,00 | 11,19 |
| 3 | Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biaya Pemungutan Pajak Daerah | 67,374,444,00 | 180,333,321,00 | 50,798,996,00 | 31,93 |
| 5 | Belanja Bagi Hasil Desa | 40.603.520.116,00 | 47.028.447.680,00 | 41.445.687.602,00 | 1,26 |
| **B** | **Belanja Langsung** |  |  |  |  |
| 1 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 540.000.000 | 337,400,000,00 | 226,400,000 | 19,51 |
| 2 | Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon, dan sejenisnya ) | 14.467.129.163,00 | 14.762.185.470,00 | 23.647.260.240,00 | 26,87 |
| 3 | Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Belanja Honorium BLUD |  |  |  |  |
| 6 | Belanja Barang & Jasa BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C** | **Pembiayaan Pengeluaran** |  |  |  |  |
| 1 | Pembentukan dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Pembayaran Utang Pihak Ketiga-Rekanan | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **TOTAL (A+B+C)** | 244.496.058.505,00 | 260.983.847.390,00 | 273.829.307.607,00 | 5,35 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

**3.4.2 Proyeksi Data Masa Lalu**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2011 – 2014 berdasarkan harga berlaku mencapai angka rata-rata, sekitar 8,99 % per tahun. Periode 2016 – 2021 PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu tumbuh10 –12 % pertahun. Peluang pencapaian target pertumbuhan PDRB dapat tercapai melalui implementasi visi dan misi Bupati Kepulauan Selayar Periode 2016 – 2021.

Jika kita menyimak Visi dan Misi Bupati Terpilih, maka Pemerintah Daerahberkeinginan untuk menurunkan jarak antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah. Artinya ada keinginan pemerintah mendorong pemerataan distribusi pendapatan sehingga terjadi peningkatan daya beli masyarakat dan sekaligus dapat menurunkan angka penganguran dan jumlah penduduk miskin.

Penyaluran bantuan sosial yang berorientasi penumbuhan usaha ekonomi produktif pada kelompok masyarakat yang tepat dan terampil di bidangnya akan mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Regulasi penyaluran bantuan ekonomi produktif sedapat mungkin dipertegas untuk menekan terjadinya penyimpangan dan jatuhnya bantuan pada kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Pengalaman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan pembelajaran yang berharga dalam penyaluran bantuan ekonomi produktif*. Out put* dari upaya tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan PDRB.

Tabel 3.33

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1** | PENDAPATAN | 898,010,424,020 | 981,699,392,122 | 1,077,144,747,684 | 1,184,626,441,652 | 1,297,711,599,517 | 1,423,449,062,468 |
| 1.1 | **Pendapatan Asli Daerah** | 46,477,787,000 | 48,095,368,000 | 50,180,173,000 | 54,972,909,500 | 55,084,714,150 | 57,448,988,565 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 4,952,000,000 | 5,319,700,000 | 5,717,420,000 | 6,581,287,000.00 | 7,235,415,200.00 | 7,975,245,520.00 |
|
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 13,144,500,000 | 14,392,450,000 | 16,013,695,000.00 | 19,545,564,500.00 | 19,226,620,950.00 | 21,071,783,045.00 |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 9,700,000,000 | 9,720,000,000 | 10,069,200,000.00 | 10,716,200,000.00 | 10,742,820,000.00 | 10,772,102,000.00 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yg sah | 18,681,287,000 | 18,663,218,000 | 18,379,858,000.00 | 18,129,858,000.00 | 17,879,858,000.00 | 17,629,858,000.00 |
| **1.2** | **Dana Perimbangan** | 774,285,000,020 | 851,712,400,022 | 936,883,640,024 | 1,030,572,004,026 | 1,133,629,204,429 | 1,246,992,124,871 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak | 23,510,764,000 | 25,861,840,400 | 28,448,024,440 | 31,292,826,884.00 | 34,422,109,573.00 | 37,864,320,529.00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 535,836,163,000 | 589,419,779,300 | 648,361,757,230.00 | 713,197,932,953.00 | 784,517,726,248.00 | 862,969,498,873.00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 214,938,073,020 | 236,430,780,322 | 260,073,858,354.00 | 286,081,244,189.00 | 314,689,368,608.00 | 346,158,305,469.00 |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | 77,247,637,000 | 81,891,624,100 | 90,080,934,660 | 99,081,528,126 | 108,997,680,938 | 119,007,949,032 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya | 20,690,573,000.00 | 22,759,630,300 | 25,035,593,330 | 27,539,152,663 | 30,293,067,929 | 33,322,374,722 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemeintah Daerah Lainnya | 5,710,079,000 | 3,200,310,300 | 3,520,341,330.00 | 3,872,375,463.00 | 4,259,613,009.00 | 4,685,574,310.00 |
| 1.3.5 | Dana Desa | 50,846,985,000.00 | 55,931,683,500 | 61,525,000,000 | 67,670,000,000 | 74,445,000,000 | 81,000,000,000 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

Berdasarkan data pada tabel 3.33 menujukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar merencanakan kemandirian daerah pada tahun 2016 sampai 2021 hanya pada kisaran 4 %. Ini berarti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2016 – 2021 diproyeksi belum mampu keluar dari posisi sangat kurang. Sekalipun proyeksi rasio PAD terhadap pendapatan daerah sangat pesimis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tetap berupaya mendorong peningkatan rasio PAD terhadap pendapatan daerah. Upaya yang akan dilakukan adalah :

1. Menggali potensi PAD yang belum menjadi obyek pungutan.
2. Menginventarisir potensi PAD menurut jenis pajak dan retribusi daerah.
3. Mengefektifkan pemungutan Retribusi dan Pajak daerah.
4. Menekan inefisiensi pungutan retribusi dan pajak daerah.

Upaya peningkatan penerimaan PAD memerlukan kerja keras dan dukungan semua pihak, utamanyalembaga pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat. Peningkatan penerimaan PAD dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat yang dapat diukur melalui perkembangan PDRB sebagai barometer ekonomi. Berdasarkan data statistik kontribusi sektor pertanian mencapai angka 43.46 % terhadap total PDRB, sisanya terbagi pada 16 sektor lainnya. Artinya sektor pertanian memegang peran penting dan sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan PDRB.

Pengaruh sektor pertanian terhadap angka PDRB masih dominan dibandingkan dengan sektor lainnya. Tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sehingga sektor ini dapat dijadikan kekuatan perekonomian daerah. Daya serap tenaga kerja pada sektor pertanian mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar, disamping sektor ikutan lainnya seperti kegiatan pengolahan produksi dan distribusi produksi.Sektor ikutan lainnya yang berpotensi tumbuh adalah jasa perdagangan dan jasa transportasi laut, darat dan udara. Melalui pendekatan pembangunan lingkup sektor pertanian diharapkan terjadi peningkatan distribusi pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli. Melalui upaya pemerataan distribusi pendapatan dan peningkatan produksi akan mendorong perubahan pola komsumsi karena pengaruh daya beli dan peningkatan kemampuan membayar kewajiban kepada negara dan jasa yang langsung diterima dari Pemerintah Daerah.

Untuk mendorong peningkatan penerimaan dari sektor jasa perhotelan dan restoran dalam bentuk pajak hotel dan restoran, maka pemerintah daerah perlu membangun daya tarik dan promosi wisata melalui media sosial yang merangsang orang berkunjung ke pulau selayar untuk keperluan investasi, berwisata dan kepentingan lainnya. Wisata bahari, pantai, dan alam merupakan salah satu bentuk wisata hobby, peminat aktivitas wisata tersebut adalah mereka yang tidak memikirkan berapa banyak uang yang harus mereka hamburkan untuk memenuhi keinginannya. *Image* yang perlu dibangun adalah tamu adalah raja dan raja membutuhkan pelayanan eksklusif serta tidak dibohongi. Jika *image* ini terbangun, maka potensi kunjungan wisatawan akan banyak dan lama tinggal di Selayar meningkat, sehingga uang yang mereka belanjakan di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin banyak.

Selain PAD, sumber pendapatan daerah yang diprediksi mengalampeningkatan cukup signifikan adalah dana perimbangan yang bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meskipun dana perimbangan merupakan kebijakan pemerintah dalam bentuk dana transfer, tetapi penerimaan tetap diprediksimengalami peningkatan setiap. Artinya, pertumbuhan penerimaan dari sektor dana perimbangan lebih cepat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang cenderung berfluktuasi. Hal ini, cukup beralasan mengingat peningkatankebutuhan pembayaran gaji pegawai negeri, pembayaran tambahan tunjangan profesi khususnya bagi guru, yang jumlahnya relatif besar. Selain itu, kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup tinggi sehingga pendanaan dalam bentuk DAK tetap diharapkan mengalami peningkatan. Guna mewujudkan tercapainya *targer*/proyeksi pendapatan daerah diharapkan Pemerintah Daerah untuk lebih intensif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga dana bagi hasil, DAU, dan DAK dapat diperoleh sesuai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Secara keseluruhan, total pendapatan daerah diprediksikan bertumbuh dengan rata-rata, sekitar 9,65 %pertahun. Pertumbuhan pendapatan diharapkan tercapai oleh beberapa asumsi antara lai: 1) pertumbuhan ekonomi lebih akseleratif dan tingkat inflasi cukup terkendali; 2) kenaikan belanja Pemerintah mempunyai dampak yang positif pada lima tahun terakhir masa pemerintahan kepala daerah tahun 2016-20211 yang dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah; 3) dukungan kebijakan pemerintah terkait dengan dana transfer ke daerah.

Tabel 3.32 yang memperlihatkan proyeksi belanja wajib dan mengikat Pemerintah Daerah periode 2016-2021 adalah belanja tidak langsung. Sisanya dialokasikan pada komponen belanja langsung pemerintah sebagaimana tertuang pada tabel 3.33 yang dikelompokkan dalam tiga komponen yaitu: 1) belanja wajib prioritas utama pada belanja langsung yang memuat pelayanan dasar mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan masyarakat, pembangunan sosial dan budaya, pembangunan infrastruktur dan perekonomian, bantuan sosial dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang patut memperoleh penghargaan pemerintah; 2) belanja langsung yang sifatnya pemberian pelayanan administrasi sesuai urusan SKPD terkait; 3) Peningkatan peran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan sumber pendapatan dan keuangan daerah.

Total belanja daerah diprediksi tumbuh rata-rata 7,28% pertahun, dari sebesar Rp. 480.553.194.067,-, tahun 2016 menjadi Rp. 666.807.089.110,-, dan untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.33. Peningkatan proyeksi belanja disebabkan semakin berkembangannya kebutuhan masyarakat yang diakomodir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini, sejalan dengan upaya pencapaian visi, misi, kebijakan dan langkah strategis Bupati Kepala Daerah periode 2016 - 2021.

Pada porsi belanja langsung lebih kecildari porsi belanja tidak langsung denganperbandingan rata-rata 51,64 : 49,36. Artinya 51,64 persen dari total belanja daerah diarahkan kepada belanja tidak langsung dan 41,36 persen belanja daerah diarahkan pada belanja langsung. Porsi belanja tidak langsung lebih dominan diarahkan pada belanja pegawai, sedangkan porsi belanja langsung lebih dominan diarahkan pada belanja Belanja Modal. Kondisi ini bermakna porsi anggaran masih lebih didominasi untuk membiayai kebutuhan aparatur dibandingkan dengan belanja publik.

Tabel 3.33

Jumlah Anggaran Berdasarkan Kelompok Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Dana** | **Alokasi** | | | | | | | | | | | | | |
| **Tahun 2015** | | **Tahun 2016** | | **Tahun 2017** | | **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | |
| **%** | **Rp** | **%** | **Rp** | **%** | **Rp** | **%** | **Rp** | **%** | **Rp** | **%** | **Rp** | **%** | **Rp** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prioritas I | 78.3 | 317,524,640,294 | 78.51 | 234,376,061,999 | 81.9 | 299,463,094,750 | 80.88 | 340,253,526,704 | 80.87 | 375,760,878,584 | 79.99 | 405,677,367,818 | 80.67 | 430,929,413,655 |
| 2. | Prioritas II | 7.1 | 33,448,866,906 | 7.8 | 126,323,660,539 | 8.55 | 53,839,383,988 | 8.15 | 68,306,026,465 | 10.53 | 86,659,855,777 | 11.68 | 109,945,359,024 | 13.02 | 139,487,676,994 |
| 3. | Prioritas III | 14.6 | 36,208,299,913 | 13.69 | 95,422,898,678 | 9.55 | 63,821,637,555 | 10.96 | 71,444,372,320 | 8.59 | 77,686,782,660 | 8.33 | 87,321,881,913 | 6.31 | 93,389,998,460 |
|  | Total | 100 | 387,181,807,113 | 100 | 456,122,621,216 | 100 | 417,124,116,293 | 100 | 480,003,925,490 | 100 | 540,107,517,020 | 100 | 602,444,608,754 | 100 | 666,807,089,109 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan).

* + 1. **Kebijakan Anggaran**

**3.4.3.1. Kebijakan Umum Anggaran**

Sasaran utama pengelolaan keuangan dan asset daerah lima tahun mendatang adalah meningkatnya akuntabillitas kinerja pengelolaan keuangan, aset, dan penerimaan daerah dalam rangka mencapai sasaran utama. Kebijakan umum anggaran ditetapkan, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah melalui penyusunan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah.Mengoptimalkan pemungutan dan penatausahaan, pencegahan kebocoran penerimaan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan daerah dan pencegahan timbulnya ekonomi biaya tinggi dalam rangka optimalisasi kewenangan daerah.
3. Memperbaiki sistem penerimaan dan pengalokasian anggaran yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui penerapan kebijakan *e-marking* yakni sebagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada pembayar pajak.
4. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas pengembalian investasi bagi daerah.
5. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintah daerah.
6. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai tujuannya dan ketentuan berlaku.
7. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan sesuai jenis dana bagi hasil yang diperoleh.
8. Menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan melalui penetapan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
9. Melaksanakan penyusunan anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, pemantapan implementasi *money follow function*dalam menyusun anggaran.
10. Mengoptimalkan upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui pemenuhan berbagai persyaratan/ketentuan yang dapat mendorong penerimaan insentif dan penambahan alokasi anggaran pemerintah.
11. Meningkatkan Efektivitas pengawasan pungutan dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif termasuk penegakan hukum.
12. Meningkatkan pengelolaan asset daerah melalui pemetaan dan pembenahan administrasi pembukuan aset dan validasi data aset daerah, sertifikasi seluruh tanah PemerintahDaerah, penertiban pemanfaatan asset daerah dan menetapkan peraturan mengenai pengelolaan asset daerah.
13. Melaksanakan kewajiban daerah terkait dengan pelepasan asset masyarakat kepada Pemerintah Daerah sebagai akibat pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

**3.4.3.2. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, dan asset daerah,sebagai berikut :

1. Tersedianya regulasi daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tersedianya basis data dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Terlaksananya evaluasi ketentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta tindak lanjut dalam implementasinya.
4. Terimplementasinya prinsip *e-marking* dalam penganggaran daerah.
5. Meningkatnya penerimaan daerah dari investasi atas pengelolaan asset daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan berlaku.
6. Terpenuhinya kebutuhan belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintah daerah dari dana alokasi umum.
7. Terlaksananya pengalokasian dana alokasi khusus sesuai ketentuan berlaku.
8. Terlaksananya pengalokasian dana bagi hasil untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan.
9. Penyusunan APBD tepat waktu dan tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu, terwujudnya tingkat realisasi belanja daerah, tingkat realisasi pajak daerah, tingkat realisasi retribusi daerah, tingkat realisasi penerimaan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis. Pada tataran ini, diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 telah memperoleh Opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
10. Meningkatnya Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
11. Terlaksananya sistem pengawasan yang preventif dan korektif serta penegakan hukum.
12. Tersedianya peta asset daerah dan kelengkapan administrasinya, serta berfungsinya Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA).
13. Terlaksananya kewajiban daerah terkait dengan pelepasan aset masyarakat kepada pemerintah daerah.

**3.4.3.3. Kebijakan Alokasi Anggaran**

Berdasarkan perkiraan kapasitas riil kemampuan anggaran daerah, ditetapkan kebijakan alokasi tentatif dari kapasitas riil kemampuan anggaran daerah kedalam berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dikelompokkan menjadi Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II, dan Kelompok Prioritas III yang tertuang pada tabel 3.34. Kebutuhan anggaran kelompok prioritas I terpenuhi terlebih dahulu, kemudian kelompok prioritas II selanjutnya kelompok prioritas III. Penetapan prioritas anggaran lihat tabel selanjutnya.

Tabel 3.34

Ketentuan Umum Kelompok Prioritas Anggaran

|  |  |
| --- | --- |
| **Kelompok Prioritas** | **Ketentuan Umum** |
| **1** | **2** |
| **Prioritas I (KP I)** | * Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di daerah yang memberi dukungan terhadap RPJMN adalah pembangunan dibidang pendidikan dengan porsi anggaran sekitar 20 % dari APBD dan Pembangunan kesehatan diberi porsi anggaran sekitar 10 % sesuai ketentuan tehnis yang berlaku. |
| * Program KP I terkait langsung dengan pelayanan ke masyarakat, dan berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, serta berdampak luas terhadap masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Disamping itu, KP I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. * Program KP I juga memuat kebijakan prioritas yaitu peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, bantuan seragam sekolah yang tidak dibiayai oleh dana gratis dan dana Bos pada tingkat SD dan SLTP, peningkatan kualitas dan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pertama serta bantuan biaya mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Bantuan biaya operasi, persalinan dan biaya transport ke rumahsakit rujukan. Pemberian bantuan Raskin gratis, bantuan bedah/rehabilitasi rumah, bantuan tunjangan hidup bagi manusia jompo, yatim piatu dan penyadang *distabilitas*yang tidak mampu serta bantuan kematian. Pemberian bantuan bibit sapi 4 ekor/ kelompok, bibit kambing 10 ekor / kelompok, bantuan peralatan pertukangan,perbengkelan, konveksi (mesin jahit ) bagi masyarakat yang tidak mampu dan terampil. Pemberian penghargaan kepada PNS, guru mengaji, guru SD, guru SMP yang berprestasi, putra daerah yang menjuarai musabaqah tilawatil Qur’an tingkat provinsi dan nasional, putra putri daerah yang berprestasi secara nasional, petugas kebersihan teladan, masyarakat yang mampu mengolah/ daur ulang sampah/ limbah rumah tangga dan pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas serta petani yang berprestasi dan dapat menjadi teladan bagi petani lainnya akan diberangkatkan umrah oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemberian bantuan makan minum bagi penumpang feri yang tertunda keberangkatannya karena situasi diluar kendali manusia selama satu hari penuh. Pemberian bantuan Saprodi pertanian untuk petani dan nelayan aktif. Pemberian bantuan modal UMK yang aktif dan penyediaan dana untuk mengantisipasi jatuhnya harga produksi pertanian unggulan daerah. |
| **Prioritas II (KP II)** | * Program KP II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat dan merupakan penjabaran dari analisis perurusan. |
| * KP II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. |
| **Prioritas III (KP III)** | * KP III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk dialokasikan belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga. |
| * Pengalokasian dana pada KP III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. |

Pengalokasian anggaran sebagaimana disebutkan pada tabel 3.34 dikongkritkan pada tabel 3.35, sebagai berikut :

Tabel 3.35

Kebijakan Alokasi Anggaran Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kelompok Prioritas** | **Target Tahun 2015** | **Alokasi** | | | | | |
| **Tahun 2016** | **Tahun 2017** | **Tahun 2018** | **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRIORITAS I** | 317,524,640,294 | 234,376,061,999 | 299,463,094,750 | 340,253,526,704 | 375,760,878,584 | 405,677,367,818 | 430,929,413,655 |
| 1 | Dinas Pendidikan Naional Kab. Kepulauan Selayar | 52,835,912,000.00 | 43,428,672,539.00 | 59,892,618,950.04 | 69,334,510,588.82 | 75,152,175,716.80 | 81,135,473,563.60 | 86,185,882,731.00 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Selayar | 20,622,525,000.00 | 62,583,399,220.00 | 29,946,309,475.02 | 34,025,352,670.41 | 37,576,087,858.40 | 40,567,736,781.80 | 43,092,941,365.50 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Kab.Kepulauan Selayar | 18,716,085,000.00 | 34,470,175,000.00 | 14,973,154,737.51 | 17,012,676,335.21 | 18,788,043,929.20 | 20,283,868,390.90 | 21,546,470,682.75 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Selayar | 73,231,259,000.00 | 124,919,660,429.00 | 71,841,142,739.55 | 85,063,381,676.03 | 93,940,219,646.00 | 101,419,341,954.50 | 107,732,353,413.75 |
| 5 | Dinas Tata Ruang, Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepulauan Selayar | 14,658,778,000.00 | 11,291,153,495.00 | 23,983,892,842.51 | 25,207,605,801.12 | 26,272,826,357.52 | 27,170,223,539.54 | 27,927,882,409.65 |
| 6 | Dinas Energi, & SDM Kab. Kepulauan Selayar | 4,455,000,000.00 | 4,334,080,662.00 | 6,990,604,158.13 | 7,704,436,717.32 | 8,325,815,375.22 | 8,849,353,936.82 | 9,291,264,738.96 |
| 7 | Dinas Pertanian Kehutanan Kab. Kepulauan Selayar | 18,107,979,000.00 | 20,094,124,600.00 | 20,949,515,059.01 | 25,188,726,369.00 | 29,627,308,488.00 | 32,127,689,336.00 | 32,621,005,859.00 |
| 8 | Dinas Perhubungan& Kominfo Kab. Kepulauan Selayar | 4,358,117,000.00 | 12,622,624,100.00 | 8,983,892,842.51 | 10,207,605,801.12 | 11,272,826,357.52 | 12,370,321,034.54 | 17,355,000,000.00 |
| 9 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar | 11,249,377,000.00 | 8,769,938,400.00 | 7,639,261,895.00 | 8,455,070,534.08 | 9,165,217,571.68 | 10,013,547,356.36 | 10,268,588,273.10 |
| 10 | Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar | 12,188,634,000.00 | 20,081,267,600.00 | 12,661,058,114.26 | 11,908,873,434.64 | 13,151,630,750.44 | 14,448,707,873.63 | 15,082,529,477.93 |
| 11 | Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Kepulauan Selayar | 7,114,936,000.00 | 7,232,616,000.00 | 6,737,919,631.88 | 7,655,704,350.84 | 8,454,619,768.14 | 9,377,740,775.91 | 9,695,911,807 |
| 12 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Kepulauan Selayar | 2,257,755,000.00 | 1,800,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kepulauan Selayar | 3,365,105,000.00 | 4,524,640,500.00 | 3,294,094,042.25 | 3,742,788,793.75 | 4,133,369,664.42 | 4,462,451,046.00 | 4,740,223,550.21 |
| 14 | BKD Kab. Kepulauan Selayar | 6,705,948,000.00 | 4,705,948,000.00 | 4,491,946,421.25 | 5,103,802,900.56 | 5,636,413,178.76 | 6,085,160,517.27 | 6,463,941,204.83 |
| 15 | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Kepulauan Selayar | 4,495,807,000.00 | 5,283,531,000.00 | 6,182,317,788.00 | 7,147,983,480.00 | 9,643,290,975.00 | 11,163,609,927.00 | 12,370,065,130.00 |
| 16 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kab. Kepulauan Selayar | 2,392,530,000.00 | 2,642,530,000.00 | 2,994,630,947.50 | 3,402,535,267.04 | 3,757,608,785.84 | 4,056,773,678.18 | 4,309,294,136.55 |
| 17 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar | 9,341,165,000.00 | 11,052,037,400.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar | 1,750,902,000.00 | 1,750,902,000.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kepulauan Selayar | 4,150,000,000.00 | 4,454,000,000.00 | 9,903,336,328.50 | 10,191,610,486.25 | 10,587,608,785.84 | 11,386,773,678.18 | 11,139,294,136.55 |
| 20 | Dinas Kebudayaan dan pariwisata | 8,055,000,000.00 | 5,270,000,000.00 | 4,797,398,777.90 | 5,450,861,497.80 | 6,575,815,375.92 | 6,808,594,428.44 | 6,903,489,206.75 |
| 21 | Bagian Ekonomi | 1,255,499,000.00 | 900,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Bagian Kesra | 2,950,270,000.00 | 2,750,270,000.00 | 3,200,000,000.00 | 3,450,000,000.00 | 3,700,000,000.00 | 3,950,000,000.00 | 4,200,000,000.00 |
| **Total** | | **284,258,583,000.00** | **394,961,570,945.00** | **299,463,094,750.83** | **340,253,526,704.00** | **375,760,878,584.70** | **405,677,367,818.66** | **430,926,138,123.76** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kelompok Prioritas** | **Target Tahun 2015** | **Alokasi** | | | | | |
| **Tahun 2016** | **Tahun 2017** | **Tahun 2018** | **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** |
|  | **PRIORITAS II** | **33.448.866.906,-** | **126,323,660,539** | **53,839,383,988** | **68,306,026,465** | **86,659,855,777** | **109,945,359,024** | **139,487,676,994** |
| 1 | Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Kepulauan Selayar | 857,360,000.00 | 757,360,000.00 | 1,390,000,000.00 | 2,015,036,852.00 | 2,590,000,000.00 | 3,590,000,000.00 | 5,165,000,000.00 |
| 2 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Kepulauan Selayar | 811,770,000.00 | 961,770,000.00 | 956,770,000.00 | 1,546,036,852.00 | 2,431,000,000.00 | 3,409,000,000.00 | 5,025,000,000.00 |
| 3 | Sekretariat KORPRI | 431,000,000.00 | 681,000,000.00 | 781,000,000.00 | 1,134,686,852.00 | 1,880,500,000.00 | 2,433,000,000.00 | 3,072,500,000.00 |
| 4 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar |  |  | 2,330,000,000.00 | 3,032,036,852.00 | 3,847,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 5,605,000,000.00 |
| 5 | Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Kep Selayar. |  |  | 2,687,439,262.69 | 2,603,017,706.00 | 3,174,430,325.06 | 4,258,360,770.72 | 5,719,630,309.82 |
| 6 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Selayar | 4,207,321,000.00 | 2,595,598,050.00 | 2,611,969,199.39 | 3,510,338,175.00 | 4,252,992,788.70 | 5,398,550,324.60 | 6,894,383,850.00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |  | 9,339,506,986.00 | 15,706,653,518.00 | 18,522,541,666.00 | 28,817,404,040.00 | 34,511,333,332.00 |
| 8 | Kecamatan Pasilambena | 931,800,000.00 | 731,800,000.00 | 961,800,000.00 | 1,116,800,000.00 | 1,276,800,000.00 | 1,436,800,000.00 | 2,346,800,000.00 |
| 9 | Kecamatan Pasimasunggu | 813,000,000.00 | 763,000,000.00 | 945,500,000.00 | 940,000,000.00 | 885,000,000.00 | 902,500,000.00 | 1,845,000,000.00 |
| 10 | Kecamatan Pasimasunggu Timur | 773,220,000.00 | 723,220,000.00 | 1,153,832,000.00 | 999,832,000.00 | 994,832,000.00 | 993,332,000.00 | 1,714,332,000.00 |
| 11 | Kecamatan Taka Bonerate | 944,300,000.00 | 894,300,000.00 | 764,300,000.00 | 916,000,000.00 | 905,500,000.00 | 909,000,000.00 | 2,264,500,000.00 |
| 12 | Kecamatan Pasimarannu | 891,300,000.00 | 841,300,000.00 | 961,000,000.00 | 1,064,832,000.00 | 1,064,832,000.00 | 1,063,832,000.00 | 1,904,332,000.00 |
| 13 | Kecamatan Bontomate'ne | 545,350,000.00 | 568,200,000.00 | 1,030,000,000.00 | 1,081,000,000.00 | 1,145,500,000.00 | 1,214,000,000.00 | 1,828,000,000.00 |
| 14 | Kecamatan Bontomanai | 502,950,000.00 | 650,000,000.00 | 1,080,000,000.00 | 1,256,000,000.00 | 1,292,500,000.00 | 1,264,500,000.00 | 1,749,000,000.00 |
| 15 | Kecamatan Buki | 546,900,000.00 | 550,000,000.00 | 721,300,000.00 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 1,481,800,000.00 |
| 16 | Kecamatan Benteng | 565,000,000.00 | 800,000,000.00 | 970,000,000.00 | 1,053,250,000.00 | 1,238,250,000.00 | 1,423,250,000.00 | 2,358,250,000.00 |
| 17 | Kecamatan Bontoharu | 484,500,000.00 | 550,000,000.00 | 900,000,000.00 | 1,002,811,500.00 | 893,985,000.00 | 703,382,100.00 | 1,915,082,200.00 |
| 18 | Kecamatan Bontosikuyu | 466,485,000.00 | 650,000,000.00 | 982,500,000.00 | 988,000,000.00 | 1,164,500,000.00 | 1,175,000,000.00 | 2,039,000,000.00 |
| 19 | Kelurahan Batangmata | 503,350,000.00 | 574,000,000.00 | 610,300,000.00 | 671,330,000.00 | 738,463,000.00 | 812,309,300.00 | 893,540,230.00 |
| 20 | Kelurahan Batangmata Sapo | 404,700,000.00 | 457,800,000.00 | 510,450,000.00 | 561,700,000.00 | 581,750,000.00 | 627,200,000.00 | 723,700,000.00 |
| 21 | Kelurahan Putabangun | 451,150,000.00 | 475,000,000.00 | 500,000,000.00 | 520,000,000.00 | 540,000,000.00 | 560,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 22 | Kelurahan Bontobangun | 438,700,000.00 | 475,000,000.00 | 475,000,000.00 | 480,000,000.00 | 490,000,000.00 | 500,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 23 | Kelurahan Benteng | 598,286,000.00 | 600,000,000.00 | 884,340,000.00 | 858,107,000.00 | 996,912,350.00 | 976,112,988.00 | 1,158,511,116.00 |
| 24 | Kelurahan Benteng Utara | 514,490,000.00 | 550,000,000.00 | 755,890,500.00 | 835,479,550.00 | 1,701,824,677.95 | 1,619,330,256.00 | 1,725,263,281.00 |
| 25 | Kelurahan Benteng Selatan | 559,300,000.00 | 575,000,000.00 | 935,000,000.00 | 1,032,500,000.00 | 1,139,750,000.00 | 1,257,725,000.00 | 1,387,497,500.00 |
| 26 | Bagian Olahraga dan Pemuda | 1,740,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 1,565,036,852.00 | 2,890,000,000.00 | 3,390,000,000.00 | 3,890,000,000.00 |
| 27 | Bagian Perekonomian |  |  | 2,068,505,000.00 | 2,410,036,852.00 | 3,084,005,000.00 | 3,599,005,000.00 | 4,044,005,000.00 |
| 28 | Bagian Tata Pemerintahan | 5,680,500,000.00 | 4,150,000,000.00 | 6,070,000,000.00 | 6,660,036,852.00 | 7,861,500,000.00 | 8,750,650,000.00 | 9,403,715,000.00 |
| 29 | Bagian Hukum | 722,050,000.00 | 722,050,000.00 | 1,610,000,000.00 | 2,105,036,852.00 | 3,050,000,000.00 | 3,440,000,000.00 | 3,830,000,000.00 |
| 30 | Bagian Pembangunan | 820,000,000.00 | 900,000,000.00 | 980,000,000.00 | 1,200,036,852.00 | 2,010,000,000.00 | 2,570,000,000.00 | 2,855,000,000.00 |
| 31 | Bagian Umum | 261,000,000.00 | 400,000,000.00 | 379,950,000.00 | 596,734,352.00 | 1,409,579,250.00 | 1,965,854,855.00 | 2,115,854,855.00 |
| 32 | Bagian Perlengkapan | 3,235,000,000.00 | 3,435,000,000.00 | 3,230,363,039.27 | 4,273,398,439.00 | 5,700,242,719.00 | 8,074,260,389.52 | 9,898,791,878.04 |
| 33 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian | 422,000,000.00 | 500,000,000.00 | 915,000,000.00 | 1,265,036,852.00 | 1,770,000,000.00 | 2,460,000,000.00 | 2,785,000,000.00 |
|
| 34 | Bagian Keuangan | 256,200,000.00 | 500,000,000.00 | 646,500,000.00 | 890,186,852.00 | 1,830,665,000.00 | 2,501,000,000.00 | 2,715,104,650.00 |
| 35 | Bagian Humas, Protokol dan PDE | 1,172,900,000.00 | 1,172,900,000.00 | 1,401,168,001.00 | 1,665,036,852.00 | 2,555,000,000.00 | 3,100,000,000.00 | 3,512,749,792.00 |
|
| **Total** | | **31,551,882,000.00** | **29,504,298,050.00** | **53,839,383,988.36** | **68,306,026,464.00** | **86,659,855,776.71** | **109,945,359,023.84** | **139,487,676,993.86** |
|  | **PRIORITAS III** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sekretariat Daerah | 8,461,300,000.00 | 9,525,000,000.00 | 13,293,510,514 | 13,325,820,706 | 13,302,740,000 | 14,969,828,019 | 16,791,324,310 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 10,050,000,000.00 | 21,222,100,000.00 | 23,063,303,000 | 25,369,633,300 | 27,867,997,630 | 30,654,797,393 | 33,720,277,132 |
| 3 | Dinas PPK ASDA | 9,082,000,000.00 | 17,097,768,072.00 | 17,000,000,000 | 19,000,000,000 | 21,000,000,000 | 23,000,000,000 | 25,000,000,000 |
| 4 | Bappeda | 4,034,979,000.00 | 5,131,457,000.00 | 5,274,174,006 | 7,523,767,095 | 7,597,182,746 | 9,112,847,021 | 8,849,931,228 |
| 5 | Inspektorat | 2,536,000,000.00 | 3,111,000,000.00 | 5,190,650,035 | 6,225,151,219 | 7,918,862,283 | 9,584,409,480 | 9,031,741,321 |
|  | **Total** | **34,164,279,000.00** | **56,087,325,072.00** | **63,821,637,555** | **71,444,372,320.00** | **77,686,782,659** | **87,321,881,913** | **93,393,273,991** |
|  | **Total Keseluruhan** | **349,974,744,000** | **480,553,194,067** | **417,124,116,294** | **480,003,925,488** | **540,107,517,020** | **602,944,608,756** | **663,807,089,109** |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(laporan keuangan beberapa seri terbitan dan hasil olahan).